

BAB III

INDONESIA DAN KETERGANTUNGAN TERHADAP UTANG LUAR NEGERI

A DOMINASI PARADIGMA NEOLIBERAL

Sebagaimana yang sudah diingatkan Gramsci, bahwa gagasan yang mendominasi karena didukung oleh suprastruktur akan menjadi *power* yang tak tertandingi oleh apa pun. Kondisi tersebut diperoleh oleh konsep kapitalisme neoliberal. Ada gagasan yang sistematis dan konsisten, dan dapat dijelaskan seolah menguntungkan bagi semua orang di dunia. Ada suprastruktur, berupa negara, lembaga resmi internasional, pasar keuangan dan pasar modal dunia, serta korporasi multinasional (MNC). Dan ada suprastruktur di masing-masing negara sedang berkembang (NSB), yang lebih melicinkan jalan bagi mereka.¹⁶³

Menurut Rosser, keberhasilan liberalisasi di Indonesia terletak pada berhasil atau tidaknya koalisi kepentingan “*mobile capitalist*”, lembaga finansial Internasional, investor Internasional, perusahaan-perusahaan multinasional dan pendukungnya seperti IMF dan Bank Dunia, dalam memenangkan perebutan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan melawan koalisi kepentingan politiko-birokrat dan konglomerat anti-liberalisasi.¹⁶⁴

Logikanya, secara intelektual dan ideologis para pendukung paradigma ini berusaha untuk mensosialisasikan asumsi-asumsi dari neoliberalisme demi terpenuhinya kepentingan eksploitasi dan imperialisme ekonomi. Instrumen yang paling relevan dan tepat sasaran guna memberlakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada pendekatan neoliberal ini terletak pada hutang luar negeri yang diberikan lembaga-lembaga kreditor internasional, terutama IMF dan World Bank kepada negara-negara berkembang.

Teknokrat ekonomi yang pada awal Orde Baru masih berjiwa kerakyatan/populis dengan membela dan memihak Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 seperti Emil Salim, yang pada tahun 1966 menulis artikel “Membina

¹⁶³ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, loc.cit hal 264

¹⁶⁴ Andrew Rosser, “The politics of Economic Liberalization in Indonesia”: *State, Market and Power*, Curzon Press, Surrey, 2002, hal.30.

Ekonomi Pancasila”, ternyata kemudian tunduk pada paham liberalisme, lebih-lebih sejak menguatnya paham globalisasi pada tahun delapan puluhan. Tokoh-tokoh senior dari teknokrat ekonomi seperti Prof. Moh. Sadli selalu menyatakan ekonom-ekonom populis “tidak berpikir realistis” dan “tidak ilmiah”.¹⁶⁵

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang tergolong agenda neoliberalisme, baik karena pertimbangan para teknokratnya maupun akibat tekanan kekuatan (modal) internasional. Mereka amat merekomendasikan agar Indonesia saat ini lebih konsisten dalam menerapkan kebijakan pro pasar, terutama sekali berupa kebijakan perdagangan bebas dan arus finansial bebas.¹⁶⁶

Menurut Revrisond Baswir, munculnya para pendukung kebijakan ekonomi neoliberal dalam merumuskan kebijakan ini tidak terlepas dari konstruksi ideologi yang dibangun melalui jalur jaringan teknokrat, yang diistilahkan “Mafia Berkeley”, yaitu sekelompok ekonom Indonesia yang difasilitasi oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk belajar dan membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal atau neoliberalisme. Keberadaan “Mafia Berkeley” ini telah ada sejak awal pemerintahan Orde Baru, yaitu para ekonom lulusan Universitas Kalifornia di Berkeley AS, yang berhasil menekan inflasi dari sekitar 600 persen di tahun 1966 menjadi dibawah 10 persen pada tahun 1969.¹⁶⁷ Hadirnya liberalisme sebagai suatu gagasan baru menggantikan sentralisme ditopang oleh hadirnya aktor-aktor yang ingin memperjuangkannya sehingga dapat di aktualisasikan ke dalam realitas melalui serangkaian kebijakan.¹⁶⁸

“Mafia Berkeley” juga dikenal dengan sebutan “Tim Widjojo” menggunakan sebutan yang digunakan oleh salah satu anggota kelompok ini, yakni M. Sadli, “Tim Widjojo.” Menurut Sadli, anggota tim yang dipimpin oleh Widjojo Nititsastro ini selain dirinya adalah Ali Wardhana, Emil Salim, Radius

¹⁶⁵ Prof. Dr. Mubyarto, Globalisme, Populisme dan ekonomi Pancasila <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul01.htm>

¹⁶⁶ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Op. Cit.*, hal 272.

¹⁶⁷ Rizal Malarangeng, *Op. Cit.*, hal 25

¹⁶⁸ Revrisond Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, 17-18.

Prawiro, Subroto. J.B. Sumarlin, Suhadi Mangkusuwondo, Adrianus Mooy dan Saleh Afif¹⁶⁹.

Seperti di Chile, kelompok Widjojo ini bekerja sama sangat erat dengan militer untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari kemiskinan melalui jalan kapitalisme. Seperti kata Sadli, kelompok dosen FE-UI ini sejak 1957 menjalin kerjasama dengan TNI lewat Seskoad di Bandung¹⁷⁰.

Dalam memajukan ekonomi nasional, Tim Widjojo ini berkeyakinan bahwa hanya melalui pasar bebas, hanya dengan cara mengintegrasikan diri ke dalam kapitalisme, bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kata Emil Salim, pengintegrasian ke dalam kapitalisme itu merupakan jalan yang "rasional," sebagai lawan dari konsep membangun ekonomi nasional yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) yang dianut oleh Soekarno. Terjadi pergeseran pemikiran yang sangat ideologis di sana. Ini sesuatu yang sangat menarik karena secara politik, rejim Orde Baru menerapkan proses de-ideologisasi yang menyeluruh di segala bidang kehidupan¹⁷¹.

Tokoh sentral yang memainkan lobby pada masa itu adalah Widjojo Nitisastro, salah seorang tokoh "Mafia Berkeley" yang paling berpengaruh. Ia bersama Ali Wardhana merupakan orang pertama yang mengajukan permintaan kepada Soeharto untuk meminta bantuan IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 9 Oktober 1997, Widjojo Nitisastro sebagai ekonomi pro-neoliberalisme IMF ini diangkat oleh lembaga tersebut sebagai penasihat presiden¹⁷².

Pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif baru berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997. Dengan dimandori oleh IMF, pemerintah Indonesia secara resmi menjalankan sebagian besar paket kebijakan ekonomi neoliberal. Ingat bahwa *Letter of Intens (LoI)* adalah surat resmi dari pemerintah Indonesia kepada IMF, yang berisi komitmen untuk menjalankan suatu paket kebijakan ekonomi. *LoI* selalu diperbaharui mengikuti *assesment* (analisa penilaian) dan *review* (penilaian dan rekomendasi)

¹⁶⁹ *Tempo*, 10 Juli 2005

¹⁷⁰ *Tempo*, *Ibid*

¹⁷¹ Coen Husain Pontoh, *Tim Widjoyo*, <http://coenpontoh.wordpress.com/2005/08/25/tim-widjojo>

¹⁷² Fadli Zon, *The IMF Game: The Role of the IMF in Bringing Down the Soeharto Regime in May 1998*, Institute for Policy studies, Jakarta, 2004, hal.33-36.

IMF. Ada 24 *LoI* selama periode akhir tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 (rata-rata satu *LoI* setiap tiga bulan). Nota keuangan RAPBN dan pernyataan resmi lainnya dari pemerintah pun tak begitu menutupi adanya agenda tersebut, meski tidak menyatakan secara terbuka agenda neoliberalisme di Indonesia sebagai paket kebijakan konsensus Washington atau neoliberalisme. Yang jelas pula, ada upaya sosialisasinya sebagai satu-satunya alternatif untuk keluar dari krisis¹⁷³.

Bahkan atas saran “Mafia Berkeley” yang dipimpin Widjojo Nitisastro, pada bulan Januari 1998 Presiden Soeharto menandatangani sendiri *Letter of Intent* (LoI), disaksikan *Managing Director* IMF, Michel Camdessus. Padahal, penandatanganan perjanjian dengan IMF oleh Presiden nyaris tidak pernah terjadi. Sebab, biasanya yang menandatangani cukup Menteri Keuangan dan/atau Gubernur Bank Sentral. Tetapi Mafia Berkeley sengaja membujuk Presiden Soeharto yang menandatangani agar mereka di kemudian hari bisa “cuci tangan”¹⁷⁴.

Prof Sadli, selaku pendukung utama kelompok ini (“Mafia Berkeley/Kelompok Widjoo”), sangat menekankan keterikatan Indonesia terhadap utang luar negeri dan *International Financial Institutions* (IFI’s), seperti dalam komentarnya¹⁷⁵ :

...Marilah kita bekerja dengan realitas yang ada. Suara-suara yang menyatakan kapok berhubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) adalah suara-suara yang tidak memahami kenyataan. Justru bangsa ini seharusnya malah bersyukur karena disaat-saat krisis ini masih ada IMF yang mau mengulurkan bantuan dan memberi utang. Sulit dibayangkan apa jadinya krisis ekonomi ini tanpa kehadiran bantuan IMF.

Begitu juga menurut Sadli, dalam komentarnya pada forum pertemuan CGI di Jakarta tahun 2000, Sadli sangat mendorong kebijakan ekonomi ala neoliberal dengan konsekuensi membayar kembali utang Indonesia itu harus

¹⁷³ Fadli Zon, *ibid*, hal 283

¹⁷⁴ Rizal Ramli dan P.Nuryadin, “10 Tahun Krisis ekonomi : solusi moneteris dan neoliberal”: *Kerawanan Lama dalam Bungkus Baru*, hal 11.

¹⁷⁵ Moh. Sadli, “Sedang Terbatuk hingga Hidden Economy”, *Harian Kompas*, Minggu 19 Januari 2003, hal. 31.

dilakukan dengan;penjualan aset yang dikuasai BPPN privatisasi BUMN peningkatan penerimaan pajak, dan kurangi belanja pemerintah dengan mengurangi subsidi,seperti subsidi BBM¹⁷⁶.

Sadli juga menekankan intervensi dalam capaian pelaksanaan kebijakan neoliberal. Indonesia memerlukan tekanan dari luar, tekanan internasional. Seperti IMF, Bank Dunia, dan Amerika Serikat. Bahkan Sadli mengemukakan bahwa Jepang sebetulnya mau ikut menekan, akan tetapi sebagai bangsa timur Jepang juga terpengaruh kebudayaan serba segan terhadap “teman dekat”, ketimbang memberi peringatan yang keras. Jepang suka pinjam tangan Barat. Sadli sangat progresif memanfaatkan ‘intervensi’ dari luar ini, untuk memperkuat tangan reformasi dalam negeri yang sering masih terikat kepada ‘kebudayaan Timur’¹⁷⁷.

Pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid, jaringan “Mafia Berkeley”, tidak mendapatkan kesempatan untuk memasuki kabinet pemerintahannya. namun mereka mendesak Abdul Rahman Wahid untuk membentuk dewan ekonomi nasional yang ketuanya adalah Emil Salim dan Sri Mulyani yang merupakan anggota inti komunitas tersebut. Mereka juga berhasil melakukan lobby terhadap Abdul Rahman Wahid agar diperbolehkan hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang Ekuin. Mereka juga berhasil membentuk tim asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri dari tokoh utama liberalisme Indonesia yaitu Widjijo Nitisastro dan Sri Mulyani. Mereka harus ikut mendampingi Menko ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris club pada 12 April⁶⁵. Posisi penting dikuasai komunitas ini pada masa pemerintahan Megawati, dimana Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Dorodjatun Kuncoro Jakti sebagai Menko Perekonomian.¹⁷⁸

Wajar jika para pendukung Gus Dur mencurigai adanya campur tangan pihak asing (kekuatan modal) dalam proses kejatuhan Gus Dur. Sebelumnya, pemerintahan Habibie tak berdaya, karena mendapat tekanan dari luar dan dalam negeri, sehingga menurut saja dengan IMF. Masih kuatnya kroni Soeharto,

¹⁷⁶ Sadly, Laporan Bank Dunia yang dipakai dalam pertemuan CGI, *Business News*, 9 Agustus 1999.

¹⁷⁷ Saddly, Pertemuan CGI di Jakarta menekankan pemberantasan korupsi *Business News*, 04 Februari 2000.

¹⁷⁸ *Jawa Pos*, 16 Agustus 2005.

membuat pemerintahan Habibie hanya “mengulur waktu” dalam melaksanakan *LoI*, berkenaan dengan upaya mereka menyelamatkan aset ekonomi kelompoknya. Pemerintahan Mega dan SBY sudah menjalankan sepenuhnya segala rekomendasi konsensus Washington. Menteri dan pejabat penting yang relevan dengan agenda neoliberal, hampir seluruhnya berasal dari poros Washington. Mega berganti dengan SBY, akan tetapi perhatikan bahwa beberapa nama di kementerian perekonomian (termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam Energi) dan pejabat Bank Indonesia tidak “pensiun”. Paling jauh bertukar posisi, atau menaikkan beberapa “kader muda”nya. Ada beberapa tokoh, yang terkesan berupaya “negosiasi” soal privatisasi, namun pada dasarnya hanya berkaitan dengan “harga”, bukan dengan soal orientasi kebijakan.¹⁷⁹

Secara jaringan dan hegemoni paradigma neoliberalisme di Indonesia, pada umumnya kita bisa membaginya dalam empat kelompok, dimana seseorang bisa saja masuk ke dalam lebih dari satu kategori. *Pertama*, mereka yang memiliki kepentingan langsung dalam proses pemupukan atau akumulasi kapital (*rent seeking* dan *capital accumulation*), karena mereka sendiri tergolong memiliki kapital yang besar jika dibandingkan kebanyakan orang lain. Sebagian besar mereka berasal dari kapitalis konco era Orde Baru, dan sebagian lainnya adalah mantan pejabat, sipil dan militer, yang “berubah” menjadi kaum kapitalis domestik. Merekalah yang saat ini paling menikmati bunga obligasi atau utang dalam negeri pemerintah¹⁸⁰.

Kedua, para pekerja profesional, terutama para ahli ekonomi dan keuangan, yang keahliannya memang menjelaskan dan menjalankan sebagian dari mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka berada di bank sentral, perbankan umum, perusahaan keuangan, bursa saham, konsultan bisnis, dan sejenisnya. Tidak sedikit yang berada di pemerintahan, dalam departemen keuangan atau menjadi petinggi di BUMN. Mereka ini yang sangat bertanggung jawab atas fenomena dominasi *headline news* tentang kurs rupiah, suku bunga, IHSG, cadangan devisa, dan yang semacamnya.

Ketiga, kalangan akademisi, yang berada di kampus dan di lembaga riset atau penelitian. Mereka berperan ganda, menjelaskan kepada publik dan mendidik

¹⁷⁹ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi *Op.Cit.*, hal 283.

¹⁸⁰ *Ibid*, 286

kader baru. Penjelasan kepada publik, melalui media massa, mengandalkan kredibilitasnya sebagai pakar atau ahli. Dalam konteks akademis, mereka banyak melakukan penelitian dan riset yang hasilnya menguatkan atau “menyempurnakan” mekanisme kapitalisme di Indonesia. Mereka pula yang membuat kurikulum pendidikan, terutama ilmu ekonomi dan keuangan, serta menulis atau menerjemahkan buku teks. Mereka yang bertanggung jawab atas penjelasan akademis tentang tujuan akhir yang mulia dari kapitalisme, kemakmuran bagi seluruh rakyat¹⁸¹.

Keempat, para politisi yang membutuhkan akses kepada modal untuk keperluan mempertahankan atau meningkatkan posisinya. Para politisi yang *in power*, umumnya “menyadari” bahwa penentangan serius melawan kapitalisme sebagai formasi sosial saat ini adalah tidak menguntungkan. Sikap politik yang dikemas sebagai seolah bersifat perlawanan, terbukti hanya berujung pada negosiasi soal “harga”. Tentu kita tidak menafikan ada beberapa politisi, yang cukup nasionalis populis, melakukan penentangan terhadap kapitalisme neoliberal. Namun jumlahnya masih sangat sedikit (minoritas).¹⁸²

Istilah “mafia barkeley” yang dahulu pernah populer, menggambarkan elit dari kelompok ketiga. Mereka yang menjadi pemikir ekonomi terpenting pada masa awal Orde Baru. Belakangan, mereka dan murid-muridnya, yang meski bukan lulusan almamater yang sama namun memiliki aliran serupa, bahkan menjadi petinggi pemerintahan, khususnya di bidang perekonomian. Para penerus ini dikenal dengan sebutan para ekonom “Poros Washington”. Penamaan ini adalah berkenaan dengan aliran pemikiran mereka yang merujuk kepada konsensus Washington era 80-an yang berisi agenda neoliberalisme, seperti yang telah dibahas di atas.¹⁸³

Di sisi lain, Revrisond mengatakan, pengaruh “Poros Washington” kuat karena adanya dukungan dari pihak asing. Mereka, kata dia, tidak hanya berbicara di dalam negeri namun juga di luar negeri. Revrisond melihat pihak asing itu tampaknya turut memiliki kepentingan terhadap ketergantungan pemerintah. Sekalipun beberapa detail pemikiran mereka berbeda, sesuai dengan perkembangan

¹⁸¹ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Op.Cit.*, hal 286.

¹⁸² *Ibid*, hal 287.

¹⁸³ *Ibid* 288.

varians dalam kapitalisme, mafia “Poros Washington” berposisi sama dengan pendahulunya (“Mafia Berkeley”) dalam pengelolaan ekonomi nasional. Bisa difahami jika para tetuanya itu bisa akur dengan generasi yang lebih muda.¹⁸⁴

Mereka itu, menurut Revrisond, antara lain Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Boediono, Frans Seda, Laksamana Soekardi, sampai Menperindag Rini Soewandi. “Kekuasaan tokoh-tokoh tersebut dalam menentukan arah kebijakan perekonomian Indonesia lebih besar daripada partai politik. Bahkan lebih besar dari presiden sekalipun.”¹⁸⁵.

Tentu saja penamaan mafia “Poros Washington” biasa diberikan oleh mereka yang berpandangan amat kritis, sehingga pihak yang disebut (di negara seperti Indonesia) mungkin tidak mau menerimanya. Akan tetapi, perhatian kita adalah pada pokok-pokok pikiran dan penalaran mereka dalam masalah ekonomi negeri ini, yang secara terang-terangan dikatakan atau dituliskannya.¹⁸⁶

Secara menyederhanakan kita dapat memetakan orang dan kelompok orang atas sikapnya terhadap agenda neoliberalisme di Indonesia. Ada kelompok penganut, pendukung yang dengan sadar memperjuangkan hampir semua agenda, seperti yang telah kita bahas di atas. Ada kelompok pendukung, meski dilakukan secara kurang sadar, dimana mereka bisa menerima agenda karena tetap bisa *survive* atau sedikit diuntungkan secara langsung ataupun tidak. Kelompok mayoritas adalah rakyat kebanyakan yang menjadi korban, yang dipaksa mendukung, secara sadar ataupun tidak. Tentu saja telah ada kelompok orang yang berusaha menolak dan melawan, secara individual maupun secara cukup terorganisir. Harus diakui memang ada intelektual yang berpihak kepada neoliberalisme sebagai ide karena cara berfikirnya sudah amat terpengaruh oleh propaganda ilmiah aliran itu.

Kelompok (terutama para ekonom) ini berpandangan bahwa kemajuan dan kesejahteraan bangsa hanya bisa diperoleh jika Indonesia sepenuhnya mengikuti agenda neoliberalisme, dan hanya membutuhkan waktu dan kerja keras lagi. Salah satu dari penulis pernah mendengar pernyataan eksplisit tentang hal ini ketika menjadi pembicara dalam suatu diskusi bersama seorang doktor ekonomi lulusan

¹⁸⁴ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Op.Cit.*, 287-288

¹⁸⁵ *Surabaya Pos*, 2 Agustus 2004

¹⁸⁶ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Ibid.*, 288

Amerika yang masih muda dan dosen dari universitas terpadang di Indonesia. Salah satu yang dikatakannya adalah bukan sistem ekonomi (kapitalisme) yang salah, melainkan bangsa Indonesia yang tidak mampu mengoptimalkannya bagi kesejahteraan rakyat, terbukti dari negaranegara lain (termasuk beberapa negara berkembang) yang kondisi perekonomiannya amat baik. Ekonom ini belum tampak sebagai bagian dari *vested interest*, dan masih bersemangat membicarakan nasib rakyat kebanyakan, sehingga murni pandangan intelektual (cara berfikir) nya¹⁸⁷.

B KETERGANTUNGAN INDONESIA TERHADAP UTANG LUAR NEGERI

B.1 KETERGANTUNGAN INDONESIA TERHADAP CGI

Ide dasar atau tujuan pragmatis pembentukan konsorsium IGGI dan CGI adalah untuk menutup kekurangan anggaran yang di butuhkan (menutup *financing gap*) Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program-program pemnangunan khususnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah di targetkan. Karenanya misi yang paling penting dalam setiap pertemuan CGI adalah seberapa besar komitmen dukungan pendanaan (*pledge*) yang di berikan para peserta CGI kepada pemerintah Indonesia.

Sebelum krisis, di akhir era 80-an, utang luar negeri pemerintah mencapai 80 persen dari PDB. Dalam periode antara 1981-1997, pemerintah telah berhasil mengurangi proporsi relatif stok utang luar negeri terhadap PDB melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat, pengelolaan fiskal yang ketat serta tingkat suku bunga dunia yang rendah (Booth, 1999). Hingga Juni 2001, total utang luar negeri pemerintah tersebut (mencangkup pula utang bank sentral terhadap IMF) mencapai US\$ 70,655 milyar, yang terdiri dari utang multilateral pada CGI sebesar US\$ 19,755 milyar ; utang multilateral non CGI sebesar US\$ 10,103 milyar; utang bilateral sebesar US\$ 23,222 milyar; utang melalui fasilitas kredit ekspor sebesar US\$ 15,049 milyar ; pinjaman komersil sebesar US\$ 1,589 milyar sedangkan yang berupa *leasing* dan *bond* masing-masing sebesar US\$ 527 juta

¹⁸⁷Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Ibid*, hal 292.

dan US\$ 400. Tabel 4 menunjukkan komposisi utang luar negeri Indonesia pada februari 2002.¹⁸⁸

Pada saat krisis 1997- 2000 : rasio utang pemerintah meningkat sekitar 80%-90 % karena pemerintah mengeluarkan obligasi rekap untuk menyelamatkan perbankan dalam negeri ; nilai tukar rupiah anjlok dari sekitar Rp 2000/ USD menjadi rata – rata Rp 10.000/ USD. Pada 2001 – 2005 : rasio utang / PDB terus menurun (sekitar 48% tahun2005) menuju tingkat yang sustainable dalam jangka panjang , Menurut OECD rate : 48 % dari PDB sudah *sustainable*, Tapi itu untuk negara negara – maju dan kelembagaanya sudah kuat. Tapi menurut riset akademis di *Emerging Market* (Karena lemahnya kelembagaan) rasio utang / PDB yang aman 35% - 40 % . Untuk Indonesia kelembagaan masih lemah dan mempertimbangkan adanya *contingent liability*. Kita perlu menurunkan rasio utang/PDB untuk mencapai kebijakan fiscal yang berkesinambungan menuju tingkat 30%.¹⁸⁹

Sejak tahun 1967 *Pledge* IGGI / CGI cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan hanya sedikit mengalami fluktuasi penurunan antara tahun 1996 – 1997 dan tahun 2000 – 2001, total *Pledge* CGI dari pertemuan pertama bulan juni 1967 sampai dengan pertemuan CGI ke 12 tanggal 21-22 Januari 2003 adalah USD 111.078,38 juta. Sedangkan total *Pledge* CGI sejak pertemuan pertama tahun 1992 sampai tahun 2003 adalah USD 58.824,89 Juta.¹⁹⁰

Diantara para kreditor dan donor anggota CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Jepang merupakan tiga kreditor / donor terbesar. Sejak Repelita II kontribusi *Pledge* ketiganya mencapai dua per tiga dari keseluruhan *Pledge* CGI. Kucuran *Pledge* CGI memang dapat mengatasi defisit anggaran pembangunan. Akan tetapi bila dicermati terdapat beberapa korelasi yang tidak selalu positif antara kenaikan dan besaran *pledge* dengan besaran defisit anggaran pembangunan.¹⁹¹ Di luar Jepang, Bank Dunia dan ADB, Peserta yang memberikan kontribusi sangat signifikan adalah Amerika Serikat dan Jerman.

¹⁸⁸ Sugeng Bahagijo, “Keterkelolaan dan Legalitas Utang Luar Negeri Indonesia”, dalam kumpulan esai “Arbitrase Utang” Penyelesaian Menyeluruh Masalah Utang Luar Negeri hal 99.

¹⁸⁹ Donatus K. Marut. “ Pembubaran CGI : What Next?” INFID Jakarta 2 Februari 2007 . Hal 7

¹⁹⁰ *Ibid*.

¹⁹¹ *Ibid*, hal 7

Sedangkan Australia, Inggris, Prancis, UNDP, EIB, dan IDB merupakan peserta-peserta yang memberikan kontribusi signifikan.¹⁹²

Ada dua acuan yang di pergunakan sebagai dasar pemberian *pledge* CGI lihat tabel 3.1 Keduanya adalah komitmen dan perkiraan pencairan dana (*disbursement*) *pledge* atas dasar komitmen menunjukkan bahwa *pledge* tersebut berdasarkan jumlah seluruh alokasi dana untuk Proyek-Proyek baru dan Proyek-Proyek perpanjangan yang merupakan komitmen kreditor/donor (*committed Project*). Dengan demikian realisasi pencairan alokasi dana komitmen tersebut bergantung pelaksanaan *committed Project* . Oleh karenanya *pledge* ini bisa saja mulai di cairkan satu tahun , dua tahun bahkan tiga tahun setelah *pledge* tersebut di nyatakan. Sering terjadi pula suatu negara mengulang kembali *pledge* atas dasar komitmen yang dinyatakan pada pertemuan CGI tahun berikutnya karena komitmen yang di berikan tahun sebelumnya bekum di cairkan. *pledge* atas dasar *disbursement* menunjukkan bahwa *pledge* tersebut berdasarkan perkiraan seluruh dana yang dapat di cairkan pada satu tahun anggaran ke depan. *pledge* yang di berikan peserta IGGI secara umum terdiri atas pinjaman dan hibah.¹⁹³

Tabel 3.1
Bentuk Komiten Bantuan dan Besarnya Pinjaman
untuk APBN 2004

Kegiatan	Bentuk Bantuan	Besarnya pinjaman (USD miliar)
Membiayai defisit APBN 2004	Pinjaman Program	1
	Bantuan proyek dan hibah	1,8
	- hibah	0,16
	- pinjaman proyek	1,64
	TOTAL	2,8
Bantuan yang tidak digunakan untuk	Kredit ekspor	0.525
	Bantuan teknis untuk	0.075

¹⁹² Donatus K. Marut, *Ibid*, hal 9

¹⁹³ Bappenas, *Op.Cit.*, hal 7-8

membiayai defisit	Pemda dan LSM	
APBN	TOTAL	0,6
TOTAL		3,4

Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa *pledge* CGI tidak serta merta atau tidak sepenuhnya berkorelasi dengan APBN berjalan. Ini berarti , sebagai contoh, bahwa rencana pinjaman proyek luar negeri pada APBN tahun anggaran 2003 sejumlah Rp 29,3 triliun bukan hanya dari *pledge* CGI bulan januari tahun 2003 melainkan juga dari *pledge* tahun- tahun sebelumnya. *pledge* yang di berikan oleh CGI sebagian besar berupa pinjaman (sekitar 85% - 90 %) dan sisanya berupa hibah (10 % - 15 %). Dalam realisasinya sebagian pinjaman tersebut dicampur dengan fasilitas kredit ekspor yang persyaratannya lebih mahal.¹⁹⁴

Pada sidang pertamanya tahun 1992, CGI memberikan *pledge* sejumlah USD 4.948,70 juta. Dari 29 peserta yang hadir, hanya 9 peserta yang memberikan *pledge* lebih dari atau sama dengan 1% jumlah total *pledge* (USD 49,5) dan hanya 5 peserta yang memberikan *pledge* di atas atau sama dengan 2 % jumlah total *Pledge* (USD 99 juta). Selama Repelita VI (tahun 1994/95 – 1998/99), Jumlah total *pledge* CGI adalah USD 29,015,09 juta . Dari 29 peserta / anggota CGI, hanya 10 anggota yang total *pledge*- nya mencapai 1 % dari total *Pledge* CGI selama Repelita VI (USD 290,1 juta) dan hanya 5 anggota yang total *Pledge*- nya mencapai 2% dari total *pledge* repelita VI (USD 580,3 juta). Sementara itu pada sidang CGI bulan Januari 2003, total *pledge* CGI yang di berikan adalah USD 3.120,5 juta. Pada pertemuan tersebut terdapat 9 peserta yang memberikan *pledge* diatas 1% jumlah total *pledge* (USD 31, 2 juta) dan 8 peserta yang memberikan *pledge* diatas 2% jumlah total *pledge* (USD 62,4 juta).¹⁹⁵

Pada pertemuan ke 10 CGI 17-18 Oktober, di Tokyo, CGI memberikan pinjaman sebesar 4,8 miliar dolar AS, sesuai yang diajukan pemerintah RI untuk menutup anggaran tahun 2001. CGI memberikan bantuan sebesar 530 juta dolar

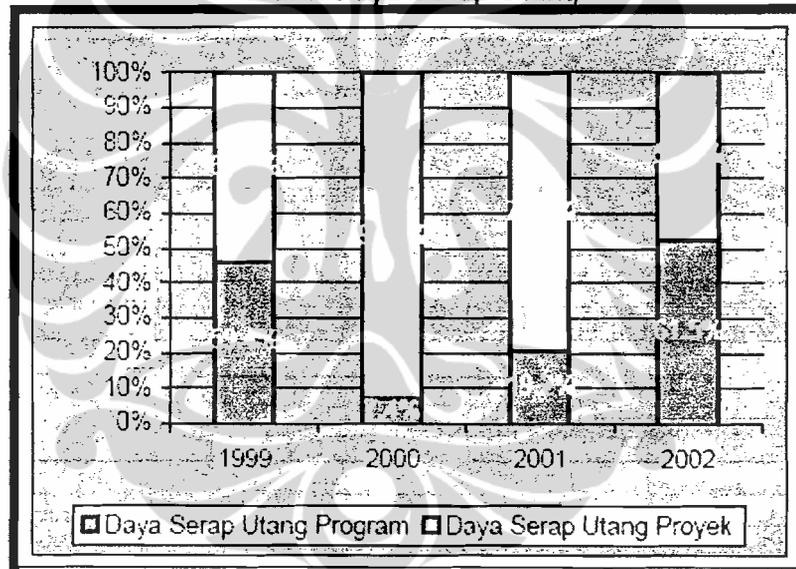
¹⁹⁴ Bappenas, *Ibid*, hal 8

¹⁹⁵ *Ibid*, hal 9

untuk *technical assistance* (bantuan teknis) serta untuk mendukung kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik, Jemaluddin Kassum,¹⁹⁶ didampingi kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Mark Baird, Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan sejumlah anggota delegasi Indonesia dalam jumpa pers sesuai penutupan Sidang CGI ke-10 yang digelar pada 17 September di Tokyo, Jepang. Kassum mengatakan, persetujuan pinjaman bagi RI itu diperoleh setelah delegasi Indonesia memberikan presentasi mengenai reformasi struktural dan masalah penanganan kemiskinan, pembenahan *good governance*, serta kekhutan¹⁹⁷.

Grafik 3.1

Grafik Daya Serap Utang



Sumber: Bank Dunia diolah

Dalam periode 1999-2002, pemerintah tidak mampu menyerap sepenuhnya seluruh komitmen utang yang sudah disetujui CGI setiap tahun (lihat Grafik 3.1). Sebagian besar utang yang mampu diserap oleh pemerintah adalah utang proyek.

¹⁹⁶ Jemal-ud-din Kassum, Vice President, East Asia and Pacific Region
The World Bank The Chairman's Closing Statement, akses dari
<http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTTRADERESEARHC/0,contentMDK:20127978~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:544849,00.html>

¹⁹⁷ *Ibid.*

Hal ini tidak mengherankan, mengingat utang proyek adalah fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit kepada kreditur yang tergabung dalam CGI. Sedangkan daya serap terhadap utang program relative rendah, karena pencairan utang ini dikaitkan dengan capaian target perubahan kebijakan sebagaimana sudah ditentukan dalam perjanjian utang (*loan agreement*). Disamping itu, menurut BAPPENAS, negara dan lembaga kreditor anggota CGI mengetahui terjadinya kebocoran penggunaan utang luar negeri, setiap tahun bocor (dikorup) minimal 20%. Anehnya, meskipun tahu ada kebocoran, CGI masih tetap mau memberikan utang baru kepada Indonesia sebesar US\$2,7 miliar¹⁹⁸.

Pertemuan CGI ke 12 diselenggarakan pada 7-8 November 2001 di gedung Bank Indonesia. Mr. Jemal-Uddin Kassum, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, memimpin pertemuan. Judul pertemuan adalah "Bekerjasama untuk Mengurangi Kemiskinan". Pertemuan CGI 2001 didahului oleh serangkaian pertemuan kelompok kerja yang membicarakan topik-topik utama dalam agenda. Sebelum pertemuan CGI, pemerintah Indonesia dan para anggota CGI juga mengadakan pertemuan konsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di Jakarta, 25-26 Oktober. Lima puluh tiga peserta dari Jakarta dan provinsi-provinsi lain mengikuti konsultasi.

CGI dalam pertemuan ini, tetap menjanjikan (*pledge*) pengucuran dana 3,14 Milyar USD selama tahun fiskal Januari-Desember 2002. 1,3 milyar dari jumlah tersebut pengucurannya tergantung pada kemajuan dalam bidang-bidang pokok reformasi. Lima isu pokok yang dibahas dalam Pertemuan CGI 2001 adalah Stabilitas Ekonomi, Pemulihan Fiskal, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pemerintahan dan Korupsi, Pemberdayaan dan 'Investasi' pada Kaum Miskin, Agenda Pengurangan Kemiskinan, Keefektifan Bantuan¹⁹⁹

Pertemuan CGI di Bali tahun 2003, merupakan penundaan jadwal pertemuan yang sediannya akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2002. Akibat peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002, pemerintah Indonesia dan anggota CGI sepakat untuk menunda pertemuan. Pada pertemuan ke- ini, negara-negara

¹⁹⁸ *Media Indonesia*, "Editorial", *Sebuah Negeri tanpa Harga Diri*, Selasa, 28 Januari 2003.

¹⁹⁹ ADB, *Report On The Eleventh Consultative Group Meeting On Indonesia*, 2001.

kreditor berharap dapat membantu Indonesia untuk mengatasi defisit APBN melalui suntikan dana segar. Pada 2001, CGI menjanjikan dukungan teknis. Namun, peristiwa bom Bali telah menurunkan kondisi ekonomi Indonesia sehingga pada 31 Oktober 2002, pemerintah Indonesia dan DPR menyepakati perlunya paket stimulus sebesar Rp 5,9 Triliun. Jika paket ini tidak diberikan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 5 % menjadi 4 %. CGI sendiri meminta pemerintah Indonesia untuk memperbesar pos pengeluaran pembangunan bagi pengembangan sektor ekonomi yang menurun akibat peristiwa bom Bali. CGI menyetujui pengeluaran Rp 54,5 Triliun untuk pembangunan konstruksi, pertanian dan kesejahteraan sosial. Dalam pertemuan ini, negara-negara menjanjikan untuk mencairkan pinjaman sebesar US \$ 2,7 juta dalam tahun anggaran 2003²⁰⁰.

Pertemuan CGI ke 13, tanggal 10-12 Desember 2003 di Jakarta, merupakan pertemuan yang tetap menarik untuk dikaji bertepatan dengan momen keluarnya Indonesia dari IMF. Meskipun akhirnya, pertemuan ini tetap menambah utang baru dan menghasilkan pinjaman yang lebih besar dengan menyetujui pinjaman bagi Indonesia sebesar USD 3,4 Miliar. Komitmen ini lebih besar daripada komitmen CGI yang disetujui pada pertemuan ke-12 CGI di Bali pada 21-22 Januari 2003 (USD 3,14 miliar). Sebagaimana pinjaman-pinjaman tahun sebelumnya, kreditor terbesar bagi Indonesia adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Jepang. Dari sekitar USD 2,8 miliar tersebut, Bank Dunia menyediakan komitmen sebesar USD 800 juta, ADB sebesar USD 600 juta. Siaran pers dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia menyebutkan pinjaman Jepang pada forum CGI kali ini sebesar USD 880 juta dimana USD 660 juta merupakan pinjaman yang sudah disepakati dan pinjaman baru serta USD 220 juta berbentuk kredit ekspor²⁰¹. Besaran kontribusi *pledge* dari anggota CGI dalam periode 2000-2003 dapat dilihat dalam Tabel 3.2. Disana menunjukkan hanya beberapa negara yang memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia.

Untuk tahun 2004 hasil pertemuan CGI ke 13 memberikan komitmen pinjaman sebanyak 3.4 miliar dolar AS, lebih besar dari permintaan Pemerintah

²⁰⁰ INFID, *Statement to the CGI Meeting in Bali*, 21-22 Januari 2003, hal 1-2.

²⁰¹ Down to Earth, *CGI: Jalan Pintas atau Jalan Lain?* <http://dte.gn.apc.org/Aif32.htm>

sebanyak 3.35 Miliar Dolar AS dan juga lebih besar dari yang di dapat tahun 2003. Dari jumlah ini direncanakan 2.8 Miliar dolar akan di salurkan ke APBN, dan sisanya lewat jalur di luar APBN. Diantara jumlah yang di janjikan ini, seperempatnya atau 880 juta dolar AS akan di pasok oleh pemerintah Jepang yang merupakan negara kreditor terbesar Indonesia selama ini. pinjaman ini terdiri atas 580 juta dolar AS Pinjaman program dan proyek yang sedang berjalan, 20 juta dolar AS dalam bentuk hibah, dan 220 juta dolar AS untuk kredit ekspor. Pinjaman tersebut akan di gunakan untuk menutupi defisit APBN 2004 yang diperkirakan akan mencapai 3.36 miliar dolar AS. Tahun 2003 untuk membiayai defisit APBN sebesar 6,25 Miliar dolar AS, Komitment pemerintah jepang tercatat sebesar 730 juta dollar AS plus penjadwalan ulang utang melalui Paris Club senilai 1.5 Miliar dolar AS²⁰².

Tabel 3.2
Kecenderungan Besaran Kontribusi Peserta CGI

No	Tahun Pertemuan CGI	Total Pledge (USD juta)	Peserta yang memberikan Pledge lebih dari atau sama dengan 1% dari total Pledge	Peserta yang memberikan Pledge lebih dari atau sama dengan 2% dari total Pledge
1	2000 (Feb)	4.731,00	Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Spanyol, Bank Dunia, ADP, UNDP (8 peserta)	Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Bank Dunia, ADP, UNDP (6 peserta)
2	2000 (Okt)	5.444,50	Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Spanyol, Bank Dunia, ADP, UNDP (9 peserta)	Amerika Serikat, Jepang, Bank Dunia, ADP, UNDP (5 peserta)
3	2001	3.713,70	Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Spanyol, Bank Dunia, ADP, UNDP (8 peserta)	Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Bank Dunia, ADP, UNDP (6 peserta)
4	2003	3.120,50	Amerika Serikat, Australia,	Amerika Serikat, Australia,

²⁰² Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia dan peran Kadin Tahun 1994 – 2004*, Yayasan Kadin Indonesia, Jakarta 2004, hal 186

			Belanda, Jepang, Jerman, Bank Dunia, ADP, EIB, UNDP (9 peserta)	Belanda, Jepang, Jerman, Bank Dunia, ADP, UNDP, EIB (8 peserta)
	Total 2000 -2003	17009,70	Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Spanyol, Bank Dunia, ADP, UNDP, EIB (9 peserta)	Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Bank Dunia, ADP, UNDP, EIB (8 peserta)

Sumber : Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral – Bappenas.2003

Penyerapan utang CGI sepanjang Tahun anggaran 2004 hanya sebesar 44,65% atau US\$1,24 miliar dari target US\$2,8 miliar, sementara secara kumulatif, pinjaman luar negeri yang terserap hanya sebesar 41,44%²⁰³. BAPPENAS menyebutkan realisasi penyerapan pinjaman sepanjang TA 2004 (penyerapan TA berjalan) terbagi atas pinjaman proyek sebesar US\$1,19 miliar (49,01%) dari target US\$2,44 miliar dan pinjaman program US\$50 juta (14,29%) dari target US\$350 juta.²⁰⁴

Pertemuan *Consultative Group on Indonesia* di Jakarta, 19-20 Januari 2005, yang semula pada peningkatan iklim investasi berubah menjadi *Accelerating Growth Toward Just and Equitable Society* akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Selain beberapa agenda yang sama seperti tahun lalu, seperti pengurangan kemiskinan, agenda antikorupsi dan reformasi serta efektivitas bantuan, salah satu agenda yang ditunggu-tunggu adalah *financing requirements* dan penentuan besaran serta jenis utang yang (akan) diberikan kepada Indonesia²⁰⁵.

Pledge untuk CGI diluar bantuan terhadap penanggulangan bencana di Aceh dan Sumatera Utara adalah sebesar US\$3,4 milyar, yang terdiri dari US\$2,8 milyar *on budget* (disalurkan melalui APBN) dan US\$600 juta disalurkan langsung diluar APBN. Pengertian *on budget* adalah semua bantuan dicatat dan

²⁰³ *Bisnis Indonesia*, Oktober 2004

²⁰⁴ INFID, Kertas Posisi :14 tahun dalam cengkraman CGI Tertindas dan Dimiskinkan, 2006

²⁰⁵ Ivan A Hadar, *CGI dan Utang Kita*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/20/opini/1510610.htm>

disalurkan melalui mekanisme APBN Pemerintah, yang berupa hibah dan pinjaman lunak²⁰⁶.

Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, pada pertemuan CGI tahun ini terdapat *pledge* khusus, yaitu bantuan yang diberikan untuk bencana di Aceh dan Sumatera Utara adalah sebesar US\$1,7 milyar, terdiri dari US\$700 juta on budget (disalurkan melalui APBN) dan US\$1 milyar disalurkan langsung diluar APBN. Dari jumlah US\$1,7 milyar tersebut, US\$1,2 milyar adalah dalam bentuk hibah, dan US\$500 juta dalam bentuk pinjaman sangat lunak dengan bunga 0% atau mendekati 0% dan masa tenggang (*grace period*) dan masa pengembalian (*maturity*) yang panjang. Sehingga jumlah keseluruhan *pledge* pada pertemuan CGI kali ini adalah sebesar US\$5,1 milyar²⁰⁷.

Walaupun ada *pledge* CGI baru pada tahun 2005 ini, tetapi karena Pemerintah Indonesia juga akan membayar pokok hutang luar negeri yang jatuh tempo pada tahun 2005 ini sebesar \pm US\$ 5,5 milyar, yang berarti lebih besar daripada jumlah utang baru, maka secara keseluruhan stok hutang luar negeri Pemerintah akan menunjukkan penurunan pada akhir tahun ini.²⁰⁸

Hasil kesepakatan CGI, 20 Januari 2005, Indonesia mendapatkan komitmen utang sebesar US\$3,4 miliar atau setara Rp.32,04 triliun. Selain itu memperoleh hibah untuk pemulihan wilayah bencana tsunami sebesar US\$ 1,7 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2005, penyerapan utang tersebut tidak melebihi dari 60%²⁰⁹.

Penyerapan pinjaman CGI hingga akhir 2005 mencapai 46,62% atau US\$7,55 miliar dari total US\$16,19 miliar yang meliputi 194 pinjaman proyek maupun program. Hal itu terungkap dari laporan Bappenas atas penyerapan pinjaman luar negeri triwulan IV/2005. Sementara itu, pinjaman proyek dalam kerangka CGI pada triwulan IV/2005 baru terserap 52,31%. Jumlah itu lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 72,95%. "Persentase penyerapan pinjaman proyek pada triwulan IV/2005 sebesar 52,31% atau US\$1,71 miliar dari target sebesar US\$3,28 miliar," tulis laporan yang

²⁰⁶ Tersedia di <http://www.ekon.go.id/v2/content/view/113/2/>

²⁰⁷ *Ibid*

²⁰⁸ *Ibid*

²⁰⁹ Ivan Hadar, *Ibid*

diperoleh Bisnis, pekan lalu. Penyerapan pinjaman tersebut meliputi pinjaman dari tiga donor utama, yaitu IBRD (*International Bank of Reconstruction and Development*), ADB, dan JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*) serta pinjaman multilateral dan bilateral serta Fasilitas Kredit Ekspor (FKE)²¹⁰.

Tahun 2006, pemerintah menerima komitmen pencairan utang dari CGI 3,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp.35 triliun untuk pembiayaan APBN 2006. Selain itu sejumlah negara kreditor itu sepakat memberi hibah 1,7 miliar dolar. Pencairan utang itu terdiri atas utang proyek 2006 senilai 2,2 miliar dolar AS dan utang program 1,5 miliar dolar AS. Di luar kesepakatan tersebut, APBN 2006 juga mendapat tambahan dari pinjaman pada APBN 2005 yang baru dicairkan tahun ini, sebesar US\$500 juta untuk rehabilitasi Aceh²¹¹.

Tahun 2006 merupakan tahun kedua pemerintah R.I. memimpin sidang rutin tahunan CGI untuk menjajagi besarnya komitmen negara donor guna membantu ekonomi Indonesia. Indikasi yang ada menunjukkan semakin meningkatnya rasa percaya diri Pemerintah untuk menurunkan penerimaan komitmen pinjaman ke tingkat yang pernah terjadi sebelum krisis tahun 1997. Sebagaimana tercermin dalam indikator *debt sustainability*, penurunan komitmen pinjaman CGI tersebut tercermin dalam rasio jumlah utang Pemerintah terhadap GDP, yang pada tahun 2001 mendekati 100%, telah menurun menjadi sebesar 48% di tahun 2005, dan diharapkan semakin menurun mendekati 42% di tahun 2006. Jumlah komitmen CGI tahun 2006 dapat dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini²¹².

²¹⁰ *Harian Bisnis Indonesia*, 13 Februari 2006 – Rubrik Ekonomi Makro

²¹¹ *Lampung Pos*, Kamis, 15 Juni 2006

²¹² *Ibid*

Tabel 3.3

	T .A. 2005 (Miliar USD)	T.A.2006 (Miliar USD)
Pinjaman Program	0,9	1,5
Pinjaman Proyek Hibah	3,6	4,8
Tanpa Hibah	1,4	0,7
Tanpa Hibah	0,0	0,0

Sumber : Depkeu, 2006

Sidang *Consultative Group on Indonesia* (CGI) tahun 2006, merupakan pertemuan ke-15 yang dilatar belakangi dengan semangat untuk mendukung Indonesia mengatasi musibah bencana gempa bumi Jogja-Jateng. Identifikasi awal atas total kerusakan dan kerugian sebagai akibat bencana gempa bumi Jogja-Jateng menghasilkan angka sebesar USD 3,1 miliar. Lebih dari 150.000 rumah dan berbagai sarana dan prasarana produksi perlu direhabilitasi²¹³.

213 Departemen Keuangan RI, diakses dari <http://www.depkeu.go.id/Ind/News/NewsControl.asp?cdcate=SP150606.htm>

TABEL 3.4
PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH YANG DISANGGUPI DALAM
SIDANG CGI MENURUT NEGARA/BADAN KREDITOR
(Juta USD / Millions of USD)

Consultative Group on Indonesia (CGI)								
Negara/ Badan Kreditor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	CREDITOR
Bilateral	2,006.0	2,339.7	971.0	964.0	887.0	1,520.0	1,460.8	Bilateral
Amerika Serikat	145.0	280.0	-	-	7.0	7.0	55.0	U S A
Australia	59.0	64.7	-	-	-	81.0	41.2	Australia
Austria	15.0	20.0	15.0	10.0	5.0	13.0	12.6	Austria
Belanda	-	-	60.0	67.0	61.0	73.0	109.0	Netherland
Belgia	-	-	6.4	7.0	9.0	10.0	12.1	Belgium
Denmark	5.0	7.0	-	2.0	-	7.0	0.9	Denmark
Inggris	33.0	15.3	-	-	-	-	92.3	United Kingdom
Italia	1.0	-	10.0	6.0	7.0	35.0	6.9	Italy
Jepang	1,560.0	1,794.0	720.0	730.0	659.0	892.0	887.0	Japan
Jerman	102.0	54.8	78.7	83.0	96.0	176.0	146.4	Germany
Kanada	11.0	4.7	-	-	-	25.0	-	Canada
Perancis	-	-	-	30.0	12.0	93.0	35.3	France
Selandia Baru	3.0	2.1	-	-	-	-	-	New Zealand
Swiss	4.0	1.0	-	-	-	4.0	-	Switzerland
Finlandi	-	-	-	-	-	4.0	2.1	Finland
Spanyol	59.0	73.0	57.0	9.0	10.0	80.0	21.9	Spain
Korea Selatan	9.0	23.1	23.0	20.0	20.0	10.0	30.1	South Korea
Norwegia	-	-	-	-	1.0	10.0	8.0	Norway
Kuwait	-	-	-	-	-	-	-	Kuwait
Portugal	-	-	0.9	-	-	-	-	Portugal
Multilateral	2,721.0	3,034.3	2,169.7	1,765.0	1,951.0	1,954.0	2,327.4	Multilateral
A D B	1,065.0	1,515.0	1,150.0	800.0	925.0	786.0	1,010.0	A D B
I D A	-	-	-	-	-	-	-	I D
I B R D	1,500.0	1,300.0	1,000.0	850.0	825.0	855.0	1,100.0	I B R D
U N D P	-	-	-	-	-	-	-	U N D P
I D B	-	20.0	-	26.0	150.0	78.0	83.0	I D B
N I B	-	19.9	19.7	-	-	-	-	N I B
I F A D	-	-	-	8.0	7.0	47.0	9.4	I F A D
Badan PBB	106.0	146.8	-	2.0	-	1.0	-	UN Organization
U N I C E F	-	-	-	-	-	-	-	U N I C E F
U E (Uni Eropa)	40.0	-	-	-	-	64.0	125.0	EU
E I B	10.0	26.2	-	79.0	44.0	60.0	-	E I B
Kuwait Fund	-	-	-	-	-	63.0	-	Kuwait Fund
Saudi Fund	-	6.4	-	-	-	-	-	Saudi Fund

Sumber: Bank Indonesia, Diolah

B.2 KETERGANTUNGAN INDONESIA TERHADAP UTANG LUAR NEGERI

Total ULN Indonesia pada akhir era Soekarno sebesar 6.3 milyar dolar AS yang terdiri dari 4 milyar dolar AS yang di buat pada masa penjajahan Belanda dan 2,3 milyar dolar AS yang di buat oleh pemerintahan Soekarno, dan membengkak menjadi 54 milyar dolar AS pada akhir pemerintahan Soeharto. Lebih Rincinya selama periode 1981–2005, ULN Indonesia tumbuh rata rata 9 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 1987 yang mencapai 22.3 persen. Sejak terjadinya krisis ekonomi terutama tahun 1999 saat kondisi perekonomian nasional mencapai titik terburuk ULN mengalami peningkatan cukup besar, dari 100.338 juta tahun 1997 menjadi 122.033 juta dolar tahun 1998 atau meningkat 21.6 persen, namun menurun kembali hingga tahun 2002 dan cenderung naik lagi setelah itu.²¹⁴

Anggapan bahwa selama ini Indonesia sepenuhnya diuntungkan dengan adanya ULN juga tidak tepat, melihat kenyataan dua hal: *pertama*, beban ULN pemerintah Indonesia semakin besar. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya porsi beban ULN di dalam APBN. Bahkan salah satu penyebab krisis ekonomi 1997 / 98 yang dipicu oleh anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah meningkatnya secara signifikan biaya ULN pemerintah dan swasta dalam rupiah yang membuat banyak perusahaan besar (konglomerat) bangkrut dan keuangan pemerintah jebol. Akhirnya pemerintah Indonesia terpaksa memanggil IMF untuk penyelamatan. *Kedua*, hingga saat ini Indonesia tetap saja masih tergantung pada ULN. Jika Indonesia selama ini betul–betul diuntungkan oleh adanya ULN, sudah lama Indonesia mandiri seperti Korea Selatan. Pada awal pembangunannya selama dekade 50-an (setelah perang korea 1951–1952) dan 60-an, Korea juga sangat tergantung pada ULN, khususnya dari AS, tapi sekarang sudah masuk di dalam klub negara-negara kreditor.²¹⁵

Angka–angka APBN tahun 2004. Beban pembayaran bunga untuk utang dalam negeri sebesar Rp 41,3 triliun dan bunga untuk hutang luar negeri sebesar Rp 24,4 triliun. Untuk bunga saja sebesar Rp 65,7 triliun. Pembayaran cicilan

²¹⁴Tulus Tahi Hamonangan Tambunan, *Pembangunan ekonomi dan Hutang luar negeri*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, Hal 18.

²¹⁵*Ibid*, hal 174

hutang pokok dalam negeri yang jatuh tempo sebesar Rp 21,1 triliun dan luar negeri sebesar Rp 44.4 triliun. Pembayaran cicilan utang pokok seluruhnya sebesar Rp 65,5 Triliun. Beban hutang seluruhnya sebesar Rp 131.2 triliun. Pembayaran bunga utang saja sudah sebesar 92.67 persen dari seluruh anggaran pembangunan yang sebesar Rp 70.9 triliun. Kalau seluruh beban utang di hitung, beban hutang sebesar 185 persen dari seluruh anggaran pembangunan.²¹⁶

ULN pemerintah (sebut ULNp) Lebih besar di bandingkan sekali pada saat krisis karena ULN swasta (ULNs) menjelang pertengahan dekade 90-an meningkat sangat pesat sampai mencapai titik tertinggi tahun 1998, sementara ULNp sempat menurun menjelang krisis pada tahun 1997 ULNs tercatat sebanyak 80.9 milyar dolar AS (atau 60 persen dari total ULN Indonesia) dan mencapai 8-3 milyar dolar AS tahun 1998 (atau hampir 55.5 persen dari total ULN) namun sejak tahun 1999 mulai menurun baik secara nominal maupun menurut persentasenya terhadap stok ULN Indonesia. Menurut persentasenya terhadap stok ULN Indonesia²¹⁷. Posisi ULNs meningkat 1.1 milyar dolar AS yakni dari 50.056 miliar dolar AS pada bulan September 2006 menjadi 51.131 miliar dolar AS pada Desember 2006 . sementara ULNp cenderung menurun dari 83, 339 miliar dolar AS Maret 2006 menjadi 74.124 miliar AS per Desember 2006.²¹⁸

ULN adalah masalah ekonomi, sosial dan politik sekaligus. Dia menyatu, berjalin-berkelindan, membentuk simpul yang rumit dengan produk akhir berupa reproduksi kapital untuk kepentingan negara, borjuasi lokal, jaringan neoliberal (“mafia berkeley”-“poros washington”) dan, utang lembaga kreditor internasional-negara kreditor dan penyertaan modal asing.

Dalam konteks ULN inilah peran lembaga kreditor “bantuan resmi” internasional semacam *World Bank/IBRD* (Bank Dunia), ADB, dan lembaga sejenisnya menjadi sangat penting. Forum yang khusus untuk melayani suatu negara, atau kawasan tertentu, semacam Indonesia yakni CGI adalah partnernya. Negara-negara kaya, lembaga kreditor bantuan resmi internasional, serta lembaga keuangan komersial internasional merupakan “pemasok” ULN. Sebagian besar

²¹⁶ Kwik Kian Gie, ”CGI dan Hutang Pemerintah”, *Kebijakan Ekonomi Politik dan hilangnya Nalar*, PT Kompas media Nusantara . Jakarta. November 2006, hal 38

²¹⁷ Tambunan , *Op, Cit* hal 283

²¹⁸ *Kompas*, Selasa 24 april 2007

ULN pada awalnya “dikemas” bersifat bantuan, sangat lunak. Perhatikan penyebutannya yang utama adalah *Official Development Assistance* (ODA), bantuan resmi pembangunan.²¹⁹

Untuk kasus Indonesia setidaknya ada empat hal hal yang merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan utang luar negeri. Pertama pada masa tertentu dimana beban hutang semakin besar, maka terjadi pengalihan dana investasi untuk cicilan . Potensi fiskal untuk pembangunan langsung hilang karena potensi anggaran tersebut harus di alihkan untuk pengeluaran rutin itu berarti ada sumber daya yang hilang dan seharusnya potensial sebagai injeksi ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Kondisi fiskal yang berat ini di ikuti oleh kontraksi dengan cara peningkatan pajak berlebihan . untuk kasus Indonesia, hampir seluruh penerimaan pajak (dua pertiga dari total penerimaan) di keluarkan untuk anggaran pengeluaran rutin sedangkan hampir separuh dari anggaran anggaran rutin adalah anggaran pengeluaran untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, jadi rakyat membayar pajak untuk dikeluarkan bagi pembayaran utang karena mayoritas penghasilan dari pajak ini tidak bergulir untuk investasi langsung.²²⁰

Kedua. Adalah pembelokan alokasi sumber daya karena suplai dana dari domain public bukan pasar (*aid switching effect*). Dampak ini terjadi karena tingkat tabungan domestik tersubstitusikan oleh utang luar negeri, yang dikeluarkan lebih banyak untuk kebutuhan konsumsi, daya dorong investasi dari dalam negeri melemah karena pembelokan alokasi sumber daya ekonomi tersebut²²¹.

Ketiga, dampak utang luar negeri terhadap perilaku kebijakan moneter tidak lain adalah kecendrungan kolektif para pengambil keputusan untuk mempertahankan *Overvaluted Currency*. Dengan kondisi krus seperti ini , maka import barang modal dan bahan baku industri, yang tidak berbasis sumber daya local, mudah dilakukan. efek pembayaran kembali utang luar negeri tersebut di

²¹⁹ Awalil Rizky dan Nasyith Majidi Op.Cit., Hal 235

²²⁰ Didik J Rachbini , Ekonomi Politik Utang, *Loc, Cit* hal 52

²²¹ *Ibid*, hal 52

harapkan tidak terlalu berat, tetapi kurs yang terlalu mahal berbahaya terhadap spekulasi²²².

Untuk kasus kebijakan moneter di Indonesia, kecenderungan mempertahankan kebijakan ini terlihat pada kebijakan mengambang terkendali, yang mempertahankan depresiasi rupiah hanya sekitar 3 persen pertahun. Padahal perbedaan, inflasi di Indonesia dengan inflasi negara yang menjadi acuan mata uang utama cukup besar, yaitu berkisar 5-6%. Keadaan *overvalue* kumulatif selama 5 tahun sebelum krisis berkisar antara 15 sampai 20 persen. Kondisi nilai tukar yang *overvalue* cenderung lebih rentan terhadap spekulasi terhadap rupiah. Ketika rupiah jatuh, para spekulan tulin dan masyarakat yang mengekornya melihat kondisi rupiah yang *overvalue* ini dan keadaan beban hutang yang berlebihan²²³

Keempat, dampak utang luar negeri adalah pemborosan dari utang itu sendiri membiayai birokrat asing, negara dan lembaga utang. Perlu di ketahui bahwa transaksi utang luar negeri di dalam domain pasar swasta (*private*), yang secara otomatis mengefisienkan dirinya sendiri. transaksi utang luar negeri dalam keadaan tertutup dan tidak transparan telah menyebabkan terciptanya pemborosan dan perburuan rente yang massif.²²⁴

Selama ini CGI sebagai lembaga kreditor ikut terlibat secara tidak langsung maupun langsung dalam kebijakan ekonomi Indonesia melalui pertemuan tahunan dan menyelip di dalam transaksi utang tersebut. Lembaga itu lebih jauh kemudian merasa mempunyai wewenang ikut campur dalam pengaturan kebijakan. Hal itu sangat merugikan dalam suatu sistem perekonomian dan memperlihatkan kebijakan tersebut tidak independen. Bisa dibayangkan jika dalam penyusunan kebijakan suatu negara ada pihak luar yang turut campur. Tentu pihak tersebut akan lebih mendahulukan kepentingannya dibanding kepentingan negara tersebut. Campur aduk kepentingan luar melalui utang itu

²²² Didik J Rachbini, *Op.Cit.*, hal 53.

²²³ *Ibid.*

²²⁴ *Ibid*, Hal 54.

dibantah, tetapi keterlibatan yang lama sekali sulit dielakkan bahwa kepentingan tersebut sangat abadi²²⁵.

Para pengambil keputusan bidang ekonomi secara langsung dan tidak langsung terus menerus di dekete oleh Bank Dunia dan Anggota CGI lainnya. Selain tekhnokrat ekonom, Lembaga multilateral ini sebetulnya sangat terkait erat dengan rancangan kebijakan liberalisasi, yang gagal menghadapi krisis ini²²⁶.

Untuk mengelola pembayaran utang luar negeri, Bank Dunia selaku pimpinan forum CGI, telah menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menempuh beberapa strategi yang dinilai mampu menjkamin keberlanjutan fiskal serta melindungi pengeluaran-pengeluaran bagi program sosial, di antaranya²²⁷.

1. Menunjukkan komitmen yang tegas untuk melaksanakan semua kewajiban internasional guna menjaga kepercayaan kreditor dan investor internasional.
2. Memanfaatkan kesempatan penjadwalan ulang pembayaran pokok dan bunga utang melalui Paris Club, yang akan ditentukan oleh kinerja Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program-program IMF serta kondisi neraca pembayaran.
3. Menurunkan defisit anggaran dari 10 persen PDB pada tahun 1998, menjadi 3,7 persen pada tahun 2001, dan 0 persen pada tahun 2004.
4. Mobilisasi pembiayaan domestik melalui privatisasi dan penjualan aset yang dikuasai BPPN.
5. Mendapatkan lebih banyak pinjaman konsesional dari CGI, khususnya dari IDA dan Bank Dunia, untuk menutup defisit anggaran yang masih ada.

Pinjaman luar negeri Indonesia yang sudah mencapai sekitar separuh dari total anggaran pembangunan, selama ini hanya dimanfaatkan pada sektor-sektor sosial, pendidikan dan kesehatan, yang merupakan sektor dasar yang harus dibenahi. Dampaknya pinjaman yang sebenarnya dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan sektor finansial menjadi tidak berkembang, sehingga membuat ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri semakin besar. Sektor

²²⁵ Didik J. Rachbini, *Pembubaran CGI 29 Januari 2007 diakses dari :*
<http://www.kemitraan.or.id/newsroom/media-news/pembubaran-cgi/lang-pref/id/>

²²⁶ Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik Utang Loc. Cit.* Hal . 88

²²⁷ *Ibid*, hal 103

kesehatan dan pendidikan seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi sekarang malah menjadi tanggung jawab negara-negara kreditor²²⁸.

Keberadaan CGI dan ketergantungan utang sudah mirip dengan ketagihan candu yang memabukkan, selain sudah mendarah daging dalam sejarah ekonomi Indonesia. Buktinya, lembaga itu hidup lebih panjang daripada umur politik sejarah kepresidenan di Indonesia. Tidak heran jika IGGI dan CGI berjalan sebagai lembaga yang menjadi bagian dari sistem ekonomi Indonesia, sejak zaman Presiden Soeharto ke Habibie, termasuk pada masa reformasi di bawah Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri²²⁹. Ketergantungan terhadap utang luar negeri adalah simbol kelemahan. Utang merupakan jalan pintas untuk “penyakit” perekonomian. Implikasi implementasinya sering menyimpang dan korupsi swasta bawaan donor dan implikasi pembayarannya sangat lama dan menyakitkan (*painfull*). Utang akan menyebabkan negara sulit mandiri. Dalam jangka pendek utang tersebut bisa membantu menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi dalam jangka panjang akan menjadikan negara dilanda ketergantungan dan sulit berkembang. Mental para pejabat publik dan pengambil keputusan secara tidak langsung akan terbentuk menjadi mental inlander, yang pada akhirnya negara tersebut sulit terlepas dari kebiasaan meminjam utang (*addict*)²³⁰.

Pada APBN 2004, diluar permintaan rutin, pemerintah harus melakukan hal-hal sebagai berikut : Menguras simpanan pemerintah sebesar Rp 19.2 triliun, menjual BUMN sebesar Rp 5 triliun, menjual asset BPPN sebesar Rp 5 triliun dan utang baru dari rakyat Indonesia sebesar Rp 32,5 triliun. Utang dari luar negeri untuk program sebesar Rp 8,5 triliun dan untuk proyek sebesar Rp 19,7 triliun. Seluruhnya Rp 89, 9 triliun. Dua pos terakhir bagian terbesarnya dari CGI dan lembaga - lembaga keuangan internasional. Jadi, semakin jelas bahwa utang yang dilakukan terus menerus tanpa henti dari CGI di tambah dengan utang dadakan yang menutup lubang besar dalam perbangan membuat pemerintah harus berutang terus. Namun, negara-negara pemberi hutang itu tetap bersemangat memberi utang. Bank Dunia mengeritik korupsi luar biasa Indonesia, tetapi tetap bersedia memberikan hutang. Bank Dunia bahkan memberikan insentif dalam

²²⁸ Kompas, Kamis, 19 Desember 2002.

²²⁹ Didik J. Rachbini Pembubaran CGI 29 Januari 2007, *Ibid*.

²³⁰ *Ibid*.

bentuk pemberian hutang yang sangat besar kalau pemerintah Indonesia memenuhi persyaratan yang di sebut *high case scenario*. Para kreditor CGI dan lembaga-lembaga keuangan internasional itu , di satu pihak menunjukkan sikap yang sulit, tetapi dilain pihak terasa jelas sekali menyodor-nyodorkan kreditnya. Perilaku donor CGI sudah menjadi rentenir²³¹.

Mengalirnya ULN di Negara Sedang Berkembang (NSB) diikuti oleh Penanaman Modal Asing (PMA). PMA, ULN memfasilitasi agar PMA bisa beroperasi dengan efisien. PMA, misalnya, tidak perlu membangun jalan raya, pembangkit listrik, prasarana telekomunikasi,serta sudah siap “dilayani” birokrasi yang lebih modern.Dan ada lagi proyek yang banyak didukung oleh ULN, yakni proyek di bidang pendidikan. Artinya, pasokan tenaga kerja terdidik juga sudah tersedia, dengan harga yang lebih murah daripada seluruhnya dibawa dari negara asal PMA²³².

Jalannya sudah selesai dirintis. NSB telah terjerat utang. Kapasitas terpasang dari pabrik-pabrik industri NSB masih bergantung pasokan impor,apalagi untuk pengembangan teknologi lebih lanjutnya. Dan yang paling penting “jaringan pemasaran” tetap dikendalikan. Namun semua ini dianggap masih belum menjamin, sehingga perlu direkayasa agar mekanisme perekonomian dunia dan dimasing-masing negara tetap menguntungkan bagi negara-negara maju, atau tepatnya bagi pemilik modal besar (kaum kapitalis) di negara maju. Bahaya adanya nasionalisasi atau pun kesadaran regional atau kesadaran peradaban, seperti Islam, Amerika Latin, atau Cina, dinilai masih laten²³³.

Pelbagai analisis menyimpulkan bahwa Indonesia kini telah terjebak dalam situasi yang disebut *Fisher Paradox*, yakni situasi di mana semakin kita melunasi kewajiban membayar ULN beserta cicilan bunganya, semakin banyak akumulasi ULN. Hal ini disebabkan karena untuk membayar utang beserta cicilan bunga utang, dibutuhkan utang baru. maka terjadilah apa yang disebut *net transfer* sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing²³⁴. Akhirnya kita

²³¹ Kwik *Loc.Cit* Hal 42

²³² Awalil Rizky dan Nasyith Majidi *Loc,Cit* Hal 236

²³³ *Ibid*, Hal 237

²³⁴ Sritua, *Loc,Cit.*, hal 3

terjebak dalam perangkap utang (*debt trap*), sehingga kemandirian dan kedaulatan sebagai suatu bangsa menjadi terancam²³⁵.

Indonesia akan terus berada dalam cengkeraman neoliberalisme yang beroperasi melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional di mana pihak asing menjadi aktor utama melalui investasi asing dan utang luar negeri²³⁶. Kebijakan pemerintahan yang lebih mendorong Indonesia tergantung pada pihak asing akan menimbulkan apa yang disebut ketergantungan finansial, ketergantungan komersial dan ketergantungan teknologi. Proses internasionalisasi modal, pertukaran dan produksi diakomodasikan oleh Indonesia.

Konstruksi neoliberalisme, secara tidak langsung melahirkan hegemoni, yakni sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakikatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan²³⁷.

Teori hegemoni oleh Gramsci ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Bagi Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai2 serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni atas lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan "dominasi" yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.²³⁸

Hegemoni menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: kepemimpinan (*derrection*) dan dominasi (*dominance*). Hubungan kedua konsep ini menyiarkan tiga hal. Pertama dominasi dijalankan atas seluruh musuh,

235 Coen Husain Pontoh, Negara dan Utang Luar Negeri, *Kompas Online*, Kamis, 13 Juni 1996.

²³⁶ Sritua, *Loc, Cit.*, hal 4

²³⁷ Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci, *Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar, 2003

²³⁸ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonion Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, 2006, hal.31.

⁷⁷ Nezar Patria & Andi Arief, *Ibid*.

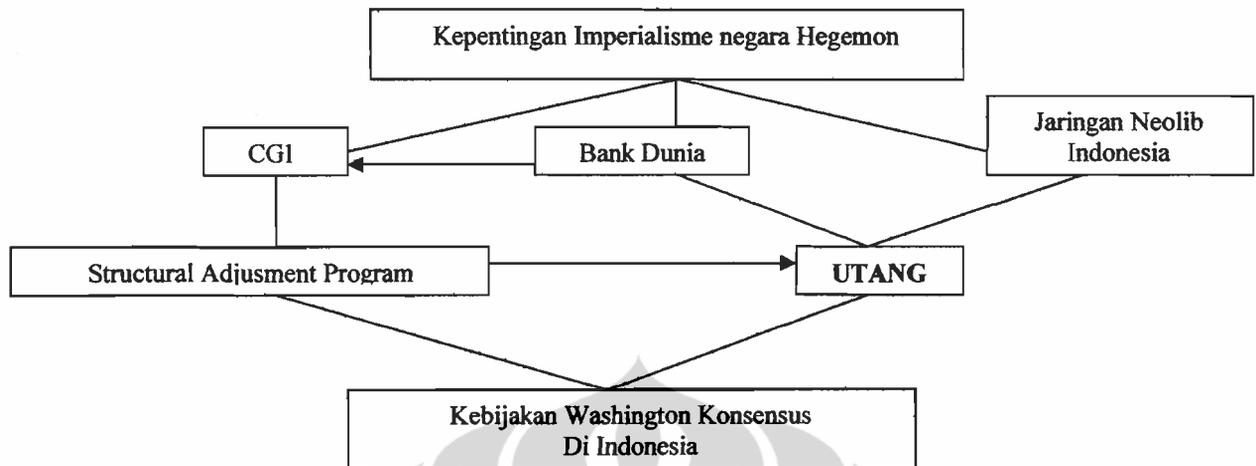
⁷⁸ Vincent Ferraro, "Dependency Theory": *An Introduction*, Mount Holyoke College South Hadley, MA, July 1996, diakses dari <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/depend.htm>

dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu. Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatus negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Dan ketiga, sekali kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi kelas ini, baik pengarahannya ataupun dominasi berlanjut.²³⁹

ULN bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat netral dan bebas nilai, “*value free*”. utang lebih merupakan alat atau senjata bagi negara hegemon untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat imperialistik dan eksploitatif terhadap negara berkembang dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan negara hegemon melalui penguasaan atas faktor-faktor ekonomi strategis (sumber daya alam, pasar, tenaga kerja, dll)

Negara hegemon AS dan sekutunya berupaya untuk mendorong diberlakukannya kebijakan-kebijakan imperialistik dalam bentuk liberalisasi dan pemotongan subsidi publik serta kebijakan eksploitatif lainnya di negara-negara berkembang melalui penciptaan rezim dan lembaga-lembaga internasional, seperti IMF, World Bank dan WTO, dan CGI sebagai konsorsium kartel untuk Indonesia yang sejak awalnya memang ditujukan untuk melayani kepentingan imperialis negara hegemon ini. Namun demikian, rezim dan lembaga-lembaga ini saja belum cukup untuk dapat benar-benar meng-*impose* kebijakan-kebijakan tersebut ke negara-negara berkembang, dibutuhkan senjata atau instrumen ampuh yang lainnya yaitu melalui hutang luar negeri. ULN yang dikururkan oleh *World Bank* kepada negara berkembang misalnya, hanya dapat terpenuhi jika negara berkembang tersebut memenuhi kondisionalitas, yang diasumsikan oleh *World Bank* merupakan prasyarat bagi efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutang secara produktif sehingga negara tersebut dapat segera melakukan pembayaran hutang yang berarti keuntungan bagi bank dunia itu sendiri. Melalui kondisionalitas utang inilah negara hegemon mendorong berlakunya kebijakan-kebijakan imperialistik yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan mereka semata, yang ironisnya justru berujung pada pemiskinan yang terjadi pada negara-negara berkembang.

Bagan.3.1



Karakteristik struktur ekonomi internasional tersebut, memungkinkan negara yang memiliki power yang dominan untuk menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktifitas-aktifitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan yang dimilikinya. Sebagai akibatnya terciptalah pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemon dengan negara lainnya, yang berujung pada ketergantungan negara dunia ketiga kepada negara hegemon, baik itu dari segi ekonomi maupun politik, bahkan tidak jarang perubahan pada struktur domestik sebuah negara yang tergantung ditentukan oleh pola hubungan yang asimetris tersebut. Dalam pendekatan dependensia, menekankan hubungan keuangan internasional, yakni ULN tidaklah netral, namun lebih mendorong ketergantungan struktur lokal dalam pembangunan.²⁴⁰ Utang luar negeri menciptakan dan memberikan intensifikasi hubungan dominasi dengan lembaga keuangan Internasional, secara sistematis dan berkala, ULN secara ekonomi politik akan mereduksi kedaulatan negara²⁴¹. Hal ini secara sistematis dapat dilihat dari bagan 3.1. Kekuatan eksternal dan internal jaringan neoliberal menggunakan utang sebagai pelaksanaan dan penerapan konsensus washington.

Sritua Arief menemukan bahwa pembayaran ULN beserta cicilan bunga utang termasuk satu di antara dua komponen utama yang menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan. Ini berarti, keyakinan bahwa ULN akan ditutup dengan

²⁴⁰ Michel Henri Bouchet, *The Political Economy of International Debt: What, Who, How much and Why*, Connecticut, Quorum books, 1987. hal 191

²⁴¹ *Ibid*, hal 192

cadangan devisa yang berasal dari net ekspor yang positif tidak memiliki bukti empiris yang absah. Bahkan, ULN telah menyebabkan dikorbkannya sumber-sumber ekonomi riil saat ini dan masa depan. ULN ternyata tidak berdampak positif dalam memperbaiki taraf hidup ekonomi rakyat. Sadar atau tidak sadar, rakyat telah bekerja untuk kepentingan pihak asing yang memiliki modal tersebut.²⁴²

Indonesia terpaksa harus menciptakan utang baru setiap tahunnya di forum CGI . Utang yang terlampau besar memaksa kita berutang terus. Indonesia sudah masuk kedalam jebakan utang atau *debt trap*.²⁴³ Seperti diungkapkan Sri Edi Swasono bahwa *debt-trap* telah menumbuhkan *cultural-trap*, di mana posisi ter subordinasi sebagai bangsa berutang telah menempatkan kita pada posisi keterdiktean, membentuk *mind-set* ke dalam pola pikir hubungan ekonomi “tuan-hamba”, yang selalu mencari kepercayaan, mencari muka, dan mencari “suaka kultural” kepada para kreditor berkat hilangnya percaya diri. Pikiran pun tergadaikan untuk selalu mencari solusi ekonomis-finansial melalui utang belaka dan melalui petunjuk para kreditor pula, “menari atas kendang mereka”.²⁴⁴

Salah satu ujud “*cultural trap*” itu adalah perbedaan paham mengenai peranan pasar-bebas yang dikumandangkan oleh para anggota negara lembaga konsorsium kreditor seperti IMF dan CGI (Indonesia). Untuk mengatur kehidupan ekonomi pun pasar tidak akan mampu mengatasi semua tuntutan pembangunan, apalagi ketimpangan-ketimpangan struktural. Kita kenal adanya *market failures* dan *market defects*, pasar yang ternyata tidak *omniscient* dan *omnipotent*, yang tidak *self-regulating* dan *self-correcting*, tidak bisa menjadi tempat bersandar. “*Market is an insufficient instrument for provisioning society, even rich society, the market is assiduous servant for the rich, but indifferent servant for the poor*”.²⁴⁵

John Galtung mencoba mengaitkan pengetahuan-pengetahuan dari penelitian perdamaian dengan kritik terhadap imperialisme yang dilakukan oleh

²⁴² Michel Henri Bouchet, *Ibid*. hal 192.

²⁴³ Kwiek, *Loc, Cit.*, hal 41.

²⁴⁴ Sri-Edi Swasono, Ringkasan *Round Table Seri I* yang diselenggarakan di Bappenas pada tanggal 17 Juli 2003, “Keberadaan dan Peran CGI atau *AID Coordinator*” : *Tinjauan Berkelanjutan Fiskal dan Upaya Mengurangi Ketergantungan*, hal 2-3

²⁴⁵ Sri Edi swasono, *Ibid*

teori *dependencia* dalam sebuah teori struktural imperialisme Galtung mengerti hubungan ketergantungan negara–negara dunia ketiga kepada negara–negara industri sebagai pencerminan kekerasan structural di dalam hubungan internasional. Namun, imperialisme oleh Galtung tidak hanya di tempatkan ditingkat hubungan antar negara, ia juga menganalisis posisi posisi kepentingan antar negara di sentra dan antar negara di periferi (model sentra periferi) menurut definisinya, imperialisme adalah hubungan sedemikian rupa adalah hubungan sebuah sebuah negara di sentra dan sebuah negara di periferi sehingga terjadi harmoni kepentingan antara sentra di bangsa sentra dan sentra di bangsa periferi , terjadi disharmoni yang lebih besar di antara bangsa bangsa di periferi daripada yang berada di bangsa-bangsa sentra, dan ada disharmonisasi kepentingan antara periferi di bangsa periferi.²⁴⁶

Struktur ketergantungan secara bertingkat mulai dari negara pusat sampai periferi disampaikan oleh Galtung. Imperialisme ditandai satu jalur kuat antara pusat di pusat dengan pusat di periferi (cC-cP).²⁴⁷ Ditambahkan Andre Gunder Frank mengumpamakan hubungan hubungan negara-negara industri Barat dengan non-industri dunia ketiga sebagai rangkaian hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dengan satelit-satelitnya.²⁴⁸

Inilah yang kemudian menjadi daya kritik kaum strukturalis, ketika melihat *free market-neoliberal* sebagai mazhab ekonomi politik Internasional negara-negara maju melakukan proses dominasi global, yang akhirnya menyebabkan *gaps* antara kelas elit, menengah hingga rakyat bawah dalam jurang kemiskinan yang dalam. Maka tidaklah heran, jika ungkapan Andre Gunder Frank mengumpamakan hubungan hubungan negara-negara industri Barat dengan non-industri dunia ketiga sebagai rangkaian hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dengan satelit-satelitnya. Ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju sangatlah begitu kuat, pemaksaan dan penerapan mazhab strategi substitusi import yang cenderung, memaksa negara berkembang dan dunia ketiga mengeksport *raw material* terhadap negara maju dan menerima limpahan paksa

²⁴⁶ Dieter Nohlen(ed.). "Kamus Dunia Ketiga", *Imperialisme*, PT Grasindo, Jakarta 1994, hal 263.

²⁴⁷ Galtung, Johan. 1980. *A Structural Theory of Imperialism*. (In: Ingolf and Anthony R. de Souza (Eds). *Dialectics of Third World Development*. Montclair, New York, hal. 261-298

²⁴⁸ Michel Henri Bouchet, *ibid*, hal, 167-168

produk pasar dan masal dari Negara maju, baik teknologi maupun material perindustrian.²⁴⁹

Struktur kapitalisme juga dapat dikaitkan dengan Cardoso (1982) tentang dependensi ekonomi. Ketergantungan ekonomi terjadi melalui perbedaan produk dan kebijakan utang yang menyebabkan eksploitasi finansial.²⁵⁰

Begitu juga yang diungkapkan oleh Santos, menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global (Barat dan Non Barat, atau industri dan negara ketiga), dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan. Terbelakang adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan konomi yang rendah diukur dari sistem kapitalis. bahwa ada tiga bentuk keterantungan, yaitu: ketergantungan kolonial, ketergantungan industri keuangan, dan ketergantungan teknologi industri. bahwa ketergantungan tersebut tak dapat diatasi tanpa perubahan kualitatif dalam ubungan struktur internal dan eksternal.²⁵¹

Dari uraian di atas terlihat, bahwa negara dunia ketiga berada dalam posisi tergantung kepada negara maju maupun lembaga kreditor internasional yang membangun konsorsium keuanagan seperti IMF, World Bank, ADB maupun CGI dalam konteks Indonesia. Hal ini terjadi terutama karena menerapkan sistem neoliberalisme yang secara teoritis memang memungkinkan terjadinya penghisapan dari satu negara terhadap negara lain. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah negara periperi yang sangat tergantung kepada negara-negara maju dan konsorsiumnya. Sebuah ketergantungan yang multi dimensi secara ekonomi, politik, teknologi, bahkan dalam cara berpikir.

²⁵⁰Michel Henri Bouchet *Op.Cit.* hal 468.

²⁵¹Santos, T. Dos. *The Structure of Dependence*, In *American Economic Review*, 1970, hal.143-147

C PENERAPAN KEBIJAKAN KONSENSUS WASHINGTON

Salah satu bentuk kebijakan yang selalu menjadi unsur utama dalam kondisionalitas ala konsensus Washington terhadap pemerintah Indonesia adalah kebijakan anggaran ketat dalam bentuk penghematan keuangan dengan cara membatasi pengeluaran pemerintah. Di bawah kerangka kebijakan penghematan anggaran ini, berbagai bentuk pengeluaran pemerintah yang dinilai membebani posisi keuangan, seperti pembiayaan proyek pembangunan dan subsidi untuk *public services*, segera di hentikan atau bahkan di putuskan. Pada awal krisis 97/98 Kebijakan anggaran ketat difokuskan pula pada kebijakan fiskal ketat dalam anggaran pemerintah yang di mainkan IMF sebagai strategi utama untuk menekan pemerintahan Soeharto telah menyebabkan semakin parahnya kondisi yang di hadapi Indonesia.²⁵²

Sementara itu, sebagai hasil dari program liberalisasi terhadap sistem ekonomi Indonesia pada periode 1997-2004 rata-rata alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan hanya berkisar 17 persen dari total anggaran. Kondisi serupa juga terjadi dalam aspek pembiayaan proyek pemerintah, dimana sebelum menjalani program bantuan dengan IMF terutama selama periode 1990 - 1996 pemerintah mengalokasikan rata-rata 15 persen dari total anggaran untuk pembiayaan proyek. Kemudian melalui kondisionalitas kebijakan fiskal ketat, alokasi tersebut di pangkas menjadi rata-rata sebesar 8 persen dari total anggaran pemerintah pada periode 1997-2004.

CGI pada pertemuan ke 10 di Jepang menguatkan persyaratan yang diberikan IMF untuk menghendaki anggaran belanja pemerintah direvisi dengan, dengan defisit sekitar 3,7 persen dari PDB. Untuk memenuhi defisit anggaran yang diminta IMF itu, pemerintah harus menutup kekurangan pembiayaan Rp 34,4 triliun. Dampaknya pemerintah "terpaksa" melakukan kebijakan fiskal ketat.²⁵³

Pada pertemuan CGI di Bali tahun 2003, CGI pun cukup puas akan kemajuan pelaksanaan desentralisasi dan akan dilaksanakannya mekanisme *on-lending* yang merupakan bagian dari program desentralisasi fiskal. Untuk itu

²⁵² Zainudin Djaffar, *Rethinking The Indonesian Crisis*, Pustaka Jaya, Jakarta 2006, hal 297.

²⁵³ *Tempo*, Jum'at, 8 Juni 2001.

penting untuk merevisi lagi UU No. 22/1999 dan UU No. 34/2000 untuk mendukung desentralisasi fiskal. Proses revisi ini harus melalui proses konsultasi publik²⁵⁴.

Agenda utama yang akan dibicarakan dalam foun CGI tahun 2001 adalah mengenai desentralisasi fiskal²⁵⁵, yakni fiskal ketat dan aturan keuangan daerah pusat. Kebijakan fiskal ketat tahun 2001 berupa; pertama, menaikkan penerimaan pemerintah melalui pajak, yang melahir keputusan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12,5 persen; kedua, mengurangi *government spending* (belanja pemerintah) berupa pengurangan pengeluaran rutin; untuk belanja pegawai Rp 2 Triliun, pengeluaran dana perimbangan otonomi daerah berkurang 5,4 triliun, subsidi BBM berkurang 6,1 triliun (yang berarti menaikkan harga BBM sekitar 30 persen) pengurangan subsidi listrik 2,9 triliun (yang berdampak pada naiknya tarif dasar listrik sekitar 20 persen) dan penurunan pengeluaran rutin lainnya sekitar 8 triliun.²⁵⁶ maksud tersembunyi kebijakan anggaran ketat adalah agar tersedia surplus anggaran untuk Indonesia membayar utang luar negeri. Dari tampak luar kebijakan uang ketat ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi.²⁵⁷

Bahkan sampai saat ini, kebijakan fiskal ketat masih menjadi warna dominan dalam kebijakan anggaran pemerintah Indonesia. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik, pembiayaan pembangunan dan proyek di tekan pada level yang sangat minim. Konsekuensi lain dari kebijakan anggaran ketat, meminimalkan kran untuk porsi subsidi.

Pelaksanaan kebijakan penghapusan subsidi BBM yang di tekan oleh IMF dan didorong pula pada pertemuan CGI ke 10 dan 11 di realisasikan oleh pemerintah Abdurrahman Wahid Pada 16 Juni 2001, dimana pemerintah secara resmi mengumumkan harga baru produk BBM yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 30%. Sebagaimana yang telah di rumuskan dalam LoI dan MEFP

²⁵⁴ INFID, *Positioning paper*, CGI Meeting in Bali, 2003.

²⁵⁵ *Kompas* 14 Maret 2001

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Rizal Ramli, wawancara, 21 November 2008

sebelumnya, argumen upaya untuk menutupi defisit APBN di jadikan latar belakang oleh pemerintah yang melandasi kebijakan tersebut.²⁵⁸

Era pemerintahan Megawati merupakan sebuah masa di mana liberalisasi harga bahan bakar minyak di bawah kondisionalitas IMF menemukan realisasinya. Dengan menggunakan landasan Pengurangan defisit anggaran sampai 2,5 Persen di tahun 2002 Bahkan pemerintahan Megawati dengan tegas menyatakan komitmennya untuk menaikan harga BBM rata-rata 30% pada bulan januari 2002. Janji Megawati kepada IMF tersebut di realisasikan pada 17 Januari 2002 dengan menaikan harga BBM rata-rata 22%.²⁵⁹

Begitu pula dalam pemerintahan SBY, pencabutan subsidi BBM juga berlangsung secara massif, pada tahun 1 Maret 2005 dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2005. Sedangkan untuk Industri dengan kenaikan harga BBM Sebesar 30% dan pada Juli sebesar 115 % untuk serta pada Agustus 93-150%. Hal secara langsung memacu kenaikan harga bahan pokok masyarakat dengan indikator pertumbuhan PDB yang melorot sebesar 2,4% pada Juli 2005. Dan secara progresif SBY menaikan harga BBM pada 1 oktober 2005 telah menaikan harga BBM jenis premium dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.300 atau dengan persentase kenaikan sebesar 87,50% kenaikan harga solar dari Rp 2.200 menjadi Rp 4.300 atau dengan prosentase kenaikan sebesar 95,45%, dan minyak tanah rumah tangga dari Rp 700 menjadi Rp 2.000 atau dengan persentase kenaikan sekitar 185,7%.²⁶⁰

Perubahan perundang-undangan di bidang sumberdaya alam pada masa transisi menjadi arena penetrasi neoliberalisme di Indonesia. Sejumlah undang-undang yang lahir mencerminkan pengamalan nilai-nilai neoliberalisme seperti privatisasi, deregulasi, liberalisasi, dan komersialisasi sumberdaya alam²⁶¹. Watak dari Undang Undang yang lahir pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memasifkan sektoralisasi sumberdaya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasi atau swastanisasi

²⁵⁸ *Suara Karya* 16 Juni 2001

²⁵⁹ *Kompas*, 17 Januari 2002

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Yance Arizona, makalah, "Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme": *Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, 5 Agustus 2008, hal 1

sektor publik yang semestinya merupakan tanggungjawab langsung dari negara. Semangat ini berakar dari apa yang dikenal dengan konsensus Washington yang menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Tak dapat dipungkiri, kesepakatan inilah yang kemudian menjadi pencetus bagi kelangsungan mekanisme pasar.²⁶² Bahkan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam fungsi negara *cq* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola (*beheersdaad*) sumberdaya alam diperbolehkan *share-holding* atau berbagi saham antara saham dari pemerintah dengan saham dari modal swasta.²⁶³

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan ekonom barat, BUMN di Indonesia dinilai tidak kompetitif dan secara umum produktifitasnya lebih rendah dibandingkan sektor swasta. Bahkan beberapa dari puluhan perusahaan tersebut selama puluhan tahun tidak menghasilkan keuntungan.²⁶⁴ Hal ini pula yang mempercepat rasionalitas pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia secara progresif. Mengingat pula, dalam setiap forum pertemuan CGI kurun 2000 hingga 2006 (pertemuan ke 15), CGI tetap memberikan perhatian khusus terhadap reformasi struktural postur perekonomian Indonesia, yang tiada lain desentralisasi ekonomi, meminimalisir kepemilikan saham negara dalam BUMN, melalui privatisasi.

Bahkan peran pelibatan swasta juga sangat dianjurkan dalam pertemuan CGI, baik dalam privatisasi BUMN, bahkan keseluruhan lini sumber daya alam dan energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ikatan penerapan konsensus Washington, lebih mengikat dalam kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk Undang- Undang yang sangat bernafaskan konsensus Washington. (lihat table 3.5).

²⁶² Winarno Yudho, dkk, *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 24

²⁶³ Yance Arizona, *Ibid*, hal 17

²⁶⁴ Rizal Malarangeng, *Op.Cit* hal 180-181.

Tabel 3.5

Tahun	Produk Kebijakan	Keterangan
1999	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan	Mempertahankan skema-skema hak privat dalam pengusahaan hutan. Seiring dengan UU Otda dan berbagai peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada Penda untuk mengeluarkan IPK di daerah
2000	UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pengaturan mengenai komersialisasi varietas pertanian, termasuk tanaman transgenik
2001	UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Penentuan tarif minyak melalui mekanisme pasar. Membentuk BP Migas yang akan melakukan kontrak kerjasama dalam pemanfaatan Migas dengan swasta.
2002	UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan	Pengalihan mekanisme pelayanan listrik dari publik ke mekanisme pasar dan privatisasi/swastanisasi perusahaan listrik dengan cara <i>unbundling</i>
2003	UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi	Melegalisasi Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. Kegiatan usaha pada sektor hulu pertambangan panas bumi yang padat modal.
2004	UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air	Komersialisasi dan privatisasi sumberdaya air
	UU No. 18/2004 tentang Perkebunan	Perencanaan perkebunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar
	UU No. 19/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan	Melegalisasi kembali pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung yang sebelumnya dilarang dalam UU No. 41/1999
	UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Pada tingkat peraturan pelaksanaannya membuka komersialisasi wilayah perikanan dengan berbagai skema hak.
2007	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	- Persamaan antara investor dalam negeri dengan investor luar negeri - Kemudahan pemindahan aset - Perpanjangan di muka hak-hak atas tanah dan jangka waktu hak-hak atas tanah yang melebihi UUPA - Pengaturan sengketa penanaman modal melalui arbitrase Internasional
	UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil	Melegalisasi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
	UU No. 30/2007 tentang Energi	Mengadopsi istilah nilai keekonomian yang hampir mirip dengan harga pasar yang sudah dibatalkan MK dalam UU Migas

Di Indonesia, kebijakan privatisasi baru pertamakali diatur pemerintah tahun 2001 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal 8 Keppres ini, dinyatakan bahwa salah satu tujuan privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan *good corporate governance*, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN.²⁶⁵ Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam pertemuan CGI ke 10. di Tokyo, CGI menekankan pelaksanaan privatisasi dua

²⁶⁵ Tim Penulis CIREs; Syamsul Hadi et al. *Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*. Cet.1. Marjin Kiri, Serpong, 2007, hal 68.

bank nasional yakni BCA dan Bank Niaga, sesuai yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan IMF dalam LoI nya.²⁶⁶

Kebijakan privatisasi BUMN juga memiliki dasar hukum yang diperkuat, yaitu UU No.19/2003 tentang BUMN. Privatisasi diarahkan dengan cara menjual saham negara (divestasi) dan sekaligus menjual saham baru(dilusi). Dengan cara ini, negara dan perusahaan mendapatkan uang kas yang bermanfaat menggerakkan ekonomi. Dengan asumsi kekuatan penyerapan pasar yang sama, investor dapat memperoleh jumlah saham yang sama tetapi dari dua sumber saham yaitu saham yang sudah ada dan saham baru yang diterbitkan. Sebagai akibatnya, jumlah saham negara menjadi lebih kecil dan modal perusahaan menjadi lebih besar.²⁶⁷ Dalam penerapan konsensus Washington, khususnya ruang lingkup privatisasi, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai undang-undang, antara lain; UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dan UU No 12/2004 Tentang Sumber Daya Air

Menurut Tantri Abeng, privatisasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*), baik dengan cara meningkatkan leverage asset yang dimiliki, ataupun dengan melibatkan pihak swasta dalam kepemilikan asset BUMN. Strategi ini menurutnya dapat dilakukan dengan: (1) *Initial Public Offering* (IPO); dan (2) *Private Placement* oleh lembaga keuangan. Namun, jika kondisi ini juga tidak memungkinkan karena lesunya pasar modal ataupun karena ketidakpastian perusahaan, maka alternatif lain yang dapat dipilih yakni: (3) *Strategic Investor*, yang dimaksudkan untuk mendatangkan dana segar (valuta asing). Selain itu, Abeng menambahkan bahwa privatisasi juga dilakukan untuk menutupi kekurangan APBN.²⁶⁸ Melalui penyerapan investasi dari luar negeri.²⁶⁹

Kontroversi paling sengit berlangsung seputar privatisasi adalah kasus divestasi Indosat. Bagi beberapa pengamat, Indosat merupakan perusahaan yang

²⁶⁶ Jemal-ud-din Kassum, *The Chairman's Closing Statement*, on Tenth CGI Meeting. Diakses dari <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTTRADERESEARHC/0,contentMDK:20127978~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:544849,00.html>

²⁶⁷ Setyanto. P. Santosa, *Implementasi Privatisasi BUMN dan pengaruhnya terhadap nasionalisme*. Diakses dari <http://kolom.pacific.net.id/ind>

²⁶⁸ Syamsul Hadi, *Op cit*, hal 71-72

²⁶⁹ *Ibid*

sehat. Ini tercermin dari tingginya harga saham perusahaan ini di Bursa Efek Jakarta ataupun pasar saham luar negeri. Pemerintah terpaksa menjual saham perusahaan ini karena kebutuhan dana segar untuk menutup defisit APBN.²⁷⁰

Privatisasi Indosat pasca krisis ini dibagi menjadi dua tahap. Pada Mei 2002, dilakukanlah privatisasi tahap pertama dengan target penjualan 11,32% (117,174 juta saham). Privatisasi Indosat tahap pertama ini tidaklah sesukses prediksi pemerintah dan gagal memenuhi target penjualan dan pendapatan. Dari target 11,32%, saham yang terjual hanya mencapai 8,1% atau 83,5 juta saham dengan perolehan dana Rp 1,1 triliun. Menanggapi kegagalan ini, penasihat keuangan privatisasi yang ditunjuk pemerintah yaitu Danareksa Sekuritas dan *Credit Suisse First Boston* (CSFB) menyatakan bahwa gangguan menjelang “*placement*” pemerintahlah penyebabnya sehingga harga yang diperoleh tidak maksimal, yaitu hanya sekitar Rp 12.000 persaham. Salah satu gangguan tersebut adalah beredarnya berita bahwa Indosat akan mengadakan *right issue* dalam waktu dekat (menjelang *placement* pemerintah). karena dua hal ini bertolak belakang dan tidak mungkin dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, investor pun kebingungan dan urung membeli saham, atau paling tidak menundanya hingga ada kepastian berita tersebut.²⁷¹

Tahap kedua privatisasi Indosat dilakukan akhir 2002 dengan penjualan saham pemerintah hingga 41,49 persen kepada *Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.* (STT) yang dimiliki Temasek. STT menjadi pemenang divestasi indosat dengan harga Rp. 12.950 per saham, lebih tinggi dari pesaingnya, Telekom Malaysia, yang mengajukan penawaran Rp 12.650 per saham. Dengan patokan kurs Rp. 9000 per AS\$1, pemerintah mendapat dana sebesar AS\$608,4 juta atau Rp. 5,62 triliun dari divestasi ini. Dengan demikian, total dana yang didapat pemerintah melalui dua kali divestasi Indosat tahun 2002 adalah Rp 6,72 triliun. Namun proses privatisasi tahun kedua ini juga tak lepas dari keganjilan-keganjilan lainnya, seperti penandatanganan kesepakatan yang dilakukan bukan pada hari kerja melainkan pada hari minggu 15 Desember 2002. Selain itu, kemenangan STT semakin meningkatkan dominasi perusahaan telekomunikasi Singapura dalam

²⁷⁰ Syamsul Hadi, *Ibid.*

²⁷¹ *Ibid.*, hal 99-100

kancah bisnis Indonesia. Sebelumnya, Singapur Telkom (SingTel) sudah menguasai 35% saham PT. Telkomsel.²⁷²

Privatisasi BUMN sudah menjadi sebuah kebijakan pemerintahan Indonesia, Dalam tahun 2001 pemerintah kembali menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo, 11,9% saham PT Telkom. Antara tahun 2002-2006 privatisasi dilanjutkan dengan menjual saham 14 BUMN dengan cara IPO dan strategic sales. Keberlanjutan penerapan privatisasi terus berlangsung, bahkan pada tahun 2006 privatisasi dilakukan karena kondisi mendesak untuk memenuhi anggaran. Salah satunya alasan pelaksanaan privatisasi untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar Rp 43 triliun.²⁷³

Dalam tahun 2003, privatisasi BUMN juga dilakukan secara massif dengan menjual saham keemilikan pemerintah, ada 10 BUMN yang masuk daftar privatisasi 2003 yakni ; BRI dijual 30% melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO), Asuransi Kredit Indonesia sebesar 45 % dengan mekanisme Strategic Sales (SS), Danareksa sebesar 51 % dengan SS, Adhi Karya sebesar 49 % dengan IPO, Pembangunan Perumahan 49 % dengan mekanisme Dijual ke Karyawan dan manajemen perusahaan (EMBO), PGN sebesar 49 % dengan mekanisme IPO, Angkasa Pura I dijual saham pemerintah sebesar 49 % dengan model SS, Berikat Nusantara dijual 89 % melalui SS, Jakarta Industri Estate dijual 50 % melalui SS dan SIER Surabaya dilepas saham 50 % melalui mekanisme SS.²⁷⁴

Begitujuga pada tahun 2004, privatisasi BUMN terus gencar dilakukan, melanjutkan privatisasi pada tahun 2003 yang belum maksimal “menjual” kepemilikan negara. BUMN yang privatisasinya sudah disetujui pada tahun sebelumnya namun belum terlaksana pada tahun itu (privatisasi lanjutan/carry over), seperti Merpati Nusantara, PTPN III, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bandara Soekarno Hatta, PT Aneka Tambang, dan PT Timah.²⁷⁵

²⁷² Syamsul Hadi, *Op. Cit.*, hal 101.

²⁷³ *Tempo*, Kamis, 22 Juni 2006

²⁷⁴ Radar sulteng online, Rabu, 17 September 2003, diakses dari

<http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=25910>

²⁷⁵ *Kompas*, 20 Januari 2004

Sedangkan untuk menutup defisit pada APBN 2005, dari privatisasi, pemerintah targetkan penerimaan sebesar Rp 3,5 triliun.²⁷⁶ Bahkan pada tahun 2005, terbit Peraturan Pemerintah sebagai payung aturan privatisasi BUMN, yakni PP No 33/2005 tentang Tata Cara Privatisasi BUMN. Beberapa hal yang diatur dalam PP tersebut antara lain adalah cara privatisasi yang tertuang dalam Pasal 5 dimana privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan secara langsung kepada investor, dan penjualan kepada manajemen dan atau karyawan Persero yang bersangkutan. Selain itu, dengan berlakunya PP ini, maka program privatisasi 2006 harus dijelaskan dalam APBN sehingga menjadi bagian dari UU APBN. Instrumen Privatisasi semakin kokoh dalam pembiayaan APBN, konstruksi Konsensus Washington, telah berjalan sesuai rancangan lembaga kreditor Internasional, hal ini juga yang menjadi salah satu agenda bahasan CGI, yakni reformasi struktural, pelibatan sektor investasi swasta dan penekanan terhadap privatisasi BUMN strategis seperti PLN.²⁷⁷

Pada tahun 2006 menggunakan sistem privatisasi neto, yakni nilai privatisasi dikurangi penyertaan modal negara (PMN) BUMN. Pada tahun 2006 ditargetkan nilai privatisasi neto sebesar Rp 1 triliun, yang terdiri dari penerimaan privatisasi Rp 3,195 triliun dikurangi PMN BUMN sebesar Rp 2,195 triliun. Privatisasi pada tahun 2006 ini diperoleh antara lain dengan penjualan saham Perusahaan Gas Negara (PGN) maksimal 5,31 persen²⁷⁸. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2006, mengeluarkan keputusan tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan, KEPRES No 18/2006, hal ini semakin menguatkan kebijakan privatisasi di Indonesia secara sistematis.

CGI dalam setiap forum pertemuannya selalu menekankan terhadap Indonesia, untuk melaksanakan persyaratan / kondisionalitas searis dengan kebijakan konsensus Washington. Pengetatan Anggaran dan fiscal, desentralisasi struktur pemerintahan, baik dalam bidang pemerintahan-otonomi, hingga distribusi pola keuangan pusat dan daerah. Prioritas reformasi struktural dalam ekonomi, keterbukaan terhadap investasi asing melalui privatisasi, pengurangan subsidi, hingga meminimalkan subsidi pemerintah juga menjadi tekanan dalam

²⁷⁶ *Kompas*, 22 oktober 2005

²⁷⁷ World Bank Brief for CGI 19-20 Januari 2005.

²⁷⁸ *Kompas*, Sabtu, 09 Desember 2006

working group yang dibentuk dan dipimpin oleh anggota CGI. Kreditor juga dominan dalam kelompok kerja karena kelompok ini dipimpin langsung lembaga atau negara kreditor, sementara pemerintah Indonesia tidak siap dalam berbagai hal. Misalnya lemahnya koordinasi antar instansi terutama pada instansi lintas sektor, tidak konsistennya keterlibatan pejabat dalam kelompok kerja karena pergantian pejabat yang di tugaskan berbeda beda dalam setiap sidang, dan kurangnya prakarsa pihak Indonesia dalam bahasan agenda agenda kelompok kerja. Tidak menghaerankan jika agenda dan isu yang di bahas dalam sidang sidang CGI lebih banyak diwarnai isu yang mengedepankan kepentingan pihak kreditor

Bank dunia sebagai bagian dari Institusi Keuangan Internasional bermazhab neoliberal, terus melakukan arahan dan dorongan terhadap terkondisikannya kebijakan Konsensus Washington bagi pemerintah Indonesia. CGI konsorsium penekan yang mengamini seluruh kebijakan arahan dan orientasi Bank Dunia maupun IMF (khususnya dalam pelaksanaan *Letter of Inten/LoI*). Penjualan asset BUMN era Megawati juga di bahas di forum CGI dibahas, lebih tegas untuk penguatan dari LoI nya IMF.²⁷⁹

Hal ini semakin sinergi, ketika para teknokrat yang memiliki orientasi pro paradigma neoliberal, yang mewakili dalam setiap kepemimpinan nasional mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid hingga Susilo Bambang Yudhoyono, mereka terus “menjaga” dan melaksanakan arahan konsensus Washington. Di era Megawati dipasang Dorijatun, Boediono dan Rini Suwandi. Mereka sangat patuh terhadap IMF dan arahan pertemuan CGI, mereka bertiga adalah termasuk lingkaran Mafia Berkeley.²⁸⁰

Di era kepemimpinan SBY, jaringan pro neoliberal semakin kuat. Sri Mulyani, Boediono dan Marie Elka Pangestu sangat dominan dalam mendorong liberalisasi ekonomi di Indonesia. Seperti ditegaskan oleh Rizal Ramli meskipun utang Indonesia ke IMF sudah lunas, bisa saja Indonesia terjebak kedalam program IMF akibat kebijakan neoliberalisme ekonomi Sri Mulyani dan

²⁷⁹ Wawancara dengan Kwik Kian Gie, 25 November 2008

²⁸⁰ Kwik Kian Gie, wawancara, *Ibid*

Boediono, Mereka tersebar pada seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala biro, tegas Rizal Ramli.²⁸¹

Maka tidak heran hegemoni neoiberal menghasilkan ketergantungan sistem ekonomi nasional kita terhadap Lembaga keuangan Internasional dan negara-negara kreditor. Ketergantungan didukung sinergisitas internal pemerintah yang didominasi kolaborator neoliberal, semakin mempercepat penerapan konsensus Washinton tanpa hambatan yang berarti.

Kebijakan Anggaran ketat yang melahirkan pencabutan subsidi seperti BBM dan pembangunan yang berorientasi *public services*. Kepentingan swstanisasi, perluasan *private sector* demi alasan efisiensi dan efektifitas yang berkelanjutan, secara langsung menciptakan dan mendorong penjualan aset-aset negara, baik BUMN dan penyerahan pengelolaan sumber daya alam terhadap swasta khususnya investor asing (*multi national cooperate /MNC*).

D PEMBUBARAN CGI: KEBERLANJUTAN KONSENSUS WASHINGTON

Tanpa diduga 24 Januari 2007 President SBY Secara berani dan membubarkan CGI , langkah luar biasa seperti ini pernah diambil Presiden Soeharto 25 Maret 1992 ketika membubarkan lembaga serupa , IGGI . pada masa itu rakyat pun kagum pada presiden Soeharto, dengan harapan dan kepercayaan Indonesia akan terbebas dari *utang baru* luar negeri untuk menutup defisit APBNnya. Karena memang itulah esensi pembubaran IGGI, yaitu menjaga kedaulatan negara .Apalagi saat itu ada GBHN yang selalu mengingatkan prinsip kemandirian, dan pinjaman luar negeri hanya pelengkap sementara. Namun kekuatan di dalam negeri yang di kenal dengan sebutan Mafia Berkeley, segera mengorganisir diri bersama jaringan asingnya membentuk CGI. Mereka berargumentasi utang luar negeri itu diperlukan Indonesia , sangat menguntungkan dan symbol kepercayaan internasional. Tegasnya, dengan lahirnya CGI utang luar negeri dalam APBN sebenarnya tidak ada artinya deklarasi pembubaran IGGI.²⁸²

²⁸¹ Wawancara Rizal Ramli, 14 November 2008

²⁸² Fuad Bawazier, *Antara CGI Dan Mafia Berkeley Republik Keluh Kesah Rakyat Merdeka Books, Jakarta , 2007, hal 270*

Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberikan penjelasannya mengenai gagasan pembubaran CGI. Agak berbeda dengan Presiden, penegasan Sri Mulyani tentang pembubaran CGI ditekankan pada agenda-agenda politik yang selalu dititipkan oleh negara-negara donor pada forum CGI. Menurut mantan petinggi IMF untuk kawasan Asia Pacific itu, CGI tidak lagi murni menjadi forum konsultasi perencanaan dan pendanaan pembangunan Indonesia namun, telah dimanfaatkan sebagai forum politik negara-negara donor. Dalam posisi seperti itu, penafsiran Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai pembubaran CGI, sama persis ketika Soeharto membubarkan IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*) secara sepihak pada 1985. Saat itu, Soeharto marah dan merasa IGGI sudah melampaui batas kewenangannya, ketika memberikan statemen mengenai pelanggaran HAM di Indonesia.²⁸³

Pernyataan dari mantan *Country Director World Bank*, Andrew Steer tentang pentingnya dibentuk sebuah forum sebagai alternatif dari CGI yang telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia²⁸⁴, tak lebih dari ungkapan kegelisahan *World Bank* karena kehilangan kendaraan untuk mendominasi proses pembuatan kebijakan pembangunan di Indonesia. Sejak berdirinya CGI, *World Bank* telah menjadi sangat dominan dengan posisinya sebagai pimpinan CGI. Bersama CGI, *World Bank* “menjadi” lembaga super di atas semua lembaga tinggi negara Indonesia. Kepemimpinan CGI di bawah pemerintah Indonesia baru dimulai tahun 2004. Namun toh seluruh agenda dan misinya tetap dikendalikan oleh *World Bank*.

Sebenarnya kesalahan kebijakan utang luar negeri yang berlangsung lama ini begitu gablang kelihatan. Tatapi kerjasama yang rapi antara pihak-pihak yang diuntungkan baik di luar maupun di dalam negeri menyebarkan praktek kejahatan ini tetap berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu meski Presiden SBY telah memutuskan pembubaran CGI belum tentu efektif mengingat besarnya kepentingan kreditor dan jaringannya di Indonesia, baik ekonomis, komersial dan politis. Apalagi mereka telah 40 tahun berpengalaman akrobat sementara SBY baru dua tahun menjabat. Selain mengharapkan penghasilan bunga untuk menutup

²⁸³ Wahyu Susilo, Artikel Setelah CGI dibubarkan, *Media Indonesia*, 29 Januari 2007.

²⁸⁴ *Jakarta Post*, 24 Februari 2007.

biaya operasionalnya, Bank Dunia dan ADB juga berkepentingan untuk tetap mempunyai klien sebagai bukti lembaganya masih dibutuhkan / tidak dibubarkan

Kekhawatiran yang muncul dengan pembubaran CGI, karena pemerintah sudah berencana mengintensifkan hubungan dengan lembaga-lembaga multilateral yaitu Bank Dunia dan ADB. Bank Dunia yang selama ini di Indonesia termasuk yang sulit dikontrol oleh masyarakat sipil bahkan oleh DPR, karena Bank Dunia mempunyai program dengan DPR dan DPRD. Bank Dunia juga sudah membentuk lembaga-lembaga seperti ornop yang bekerja untuk Bank Dunia dan menggunakan manajemen Bank Dunia dan mereka juga bekerja untuk parlemen. Bank Dunia sekarang sudah bisa mengontrol DPR untuk program-program yang dikerjasamakan.

Di sisi lain perlu adanya kewaspadaan terhadap pembubaran CGI, menjadi langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga yang sulit dikontrol oleh pemerintah Indonesia maupun masyarakat sipil. Bank Dunia sudah membentuk lembaga-lembaga sendiri yang mewakili masyarakat-masyarakat sipil di pertemuan-pertemuan Bank Dunia. Sehingga mereka sudah mengkondisikan informasi-informasi apa yang bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan Bank Dunia. Ini yang akan menjadi hambatan bagi Indonesia untuk mengadakan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Karena ada kemungkinan negara-negara tersebut lebih percaya informasi dari Bank Dunia daripada dari pemerintah Indonesia. Prioritas Bank Dunia adalah liberalisasi komoditi primer terutama pertanian. Di Indonesia sejak awal Bank Dunia mendorong privatisasi dan liberalisasi aspek pertanian. Dan tahun ini Bank Dunia tetap percaya bahwa kenaikan harga beraslah yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Bank Dunia dan ADB adalah dua lembaga yang dipercaya oleh IMF untuk memonitor SAP dan reformasi Keuangan dan Ekonomi yang disyaratkan IMF dalam pencairan utang.²⁸⁵

Pembubaran CGI merupakan langkah politik yang menyatakan, Indonesia ingin berdiri sama tinggi dengan negara kreditor/donor dan lembaga keuangan internasional dan bebas menentukan kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonominya sendiri. Namun, banyak sekali yang harus dilakukan

²⁸⁵ INFID, positioning paper, *Pembubaran CGI, What next*, 2007, hal 2.

Pemerintah Indonesia untuk mencapai kesetaraan dan kemandirian ini. Bernegosiasi secara bilateral bukan jawaban untuk mencapai kesetaraan dan kemandirian itu. Yang penting adalah persyaratan apa yang ditetapkan dan kemudian disetujui kedua pihak dalam negosiasi bilateral itu. Apabila dalam negosiasi dengan tiga kreditor utama seperti; Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Jepang, namun Indonesia tetap setuju dengan persyaratan atas penjualan aset, pencabutan subsidi, dan privatisasi, maka tetap saja sebenarnya Indonesia terjerat dalam ketergantungan dan kondisionalitas.

Indonesia setidaknya harus mengajukan syarat, utang dan pinjaman yang akan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat internasional tentang *aid effectiveness*, yaitu kucuran dana untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, bukan untuk belanja barang dan jasa dari negara kreditor, dan meminta bahwa utang/pinjaman harus merupakan *untied loan*. Sebagai imbalan, tentu saja Indonesia perlu memantau penggunaan dana dan memberantas korupsi.²⁸⁶

Sedangkan kemandirian Indonesia perlu dilihat dalam seberapa independen Indonesia dalam menentukan kebijakannya. Akankah kebijakan fiskal kita berubah menjadi lebih *pro poor* dan *pro job* seperti yang selama ini diusulkan sehingga APBN kita bisa menjadi stimulus pembangunan? Atau, akankah kita mempertahankan kebijakan fiskal yang superketat seperti sekarang? Kemandirian juga perlu dilihat pada seberapa banyak sumber pendanaan alternatif dilakukan. Akankah Indonesia maju dengan usulan pemotongan utang dan penggenjotan pajak yang kemudian dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat? Apabila ini semua tidak dilaksanakan, pembubaran CGI tidak akan banyak bermakna dan menyiratkan semakin kokohnya penerapan kebijakan konsensus Washington di Indonesia, hal ini dapat ditengok dengan rencana pengajuan utang baru dan privatisasi 38 BUMN pada tahun 2008.²⁸⁷

²⁸⁶ Biny Buchori, Indonesia masih tergantung kreditor, *Media Indonesia*, 29 Januari 2007

²⁸⁷ *Bisnis Indonesia*, 5 Januari 2008